

**KONFLIK PEMBERIAN KESEMPATAN JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN DALAM KONTRAK PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu hukum**

Oleh :

**PUTERI WIDYA SYAHNA HIDAYAT
NIM: 145010101111162**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

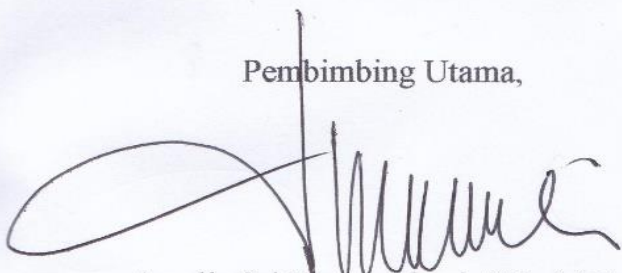
SKRIPSI
KONFLIK PEMBERIAN KESEMPATAN JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

PUTERI WIDYA SYAHNA HIDAYAT
NIM: 145010101111162

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal
dan disahkan pada tanggal

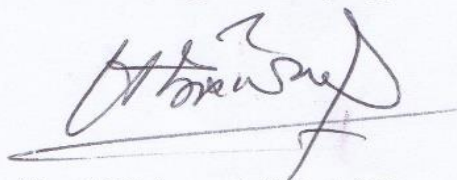
04 JAN 2019

Pembimbing Utama,



Amelia Sri Kusumadewi, SH., M.Kn
NIP. 19811214 200801 2 001

Pembimbing Pendamping,



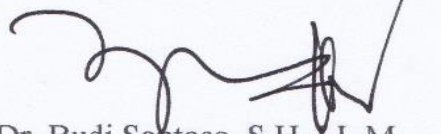
Shanti Riskawati, SH., M.Kn
NIP. 201201 801216 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rachmad Safa'at, S.H, M.Si
NIP. 196208051988021001

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Budi Santoso, S.H, LL.M
NIP. 197206222005011002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 21 Nopember 2018
Yang menyatakan,

Puteri Widya Syahna Hidayat
NIM. 145010101111162



KATA PENGANTAR

Bismillahhi Rahman ni Rohim

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada hentihingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmat Safa'at, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Amelia Srikusumadewi, SH., M.Kn selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Shanti Riskawati, SH., M.Kn selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Bapak ku tersayang Rahmat Hidayat, Mama tercinta Siti Nadiroh, dan Adikku M. Thohir Alnamalagadoni yang selalu memberikan doa, motivasi serta dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini hingga dapat gelar sarjana.
7. Kakek tersayang Hamli Bahrn dan Nenek tercinta Fatlawina serta keluarga yang selalu memberikan doa dan motivasi tiada henti kepada penulis.
8. Kekasih ku Muhammad Ikhdian dan Keluarga yang selalu menemani mengerjakan skripsi ini juga memberikan dorongan kepada penulis.
9. Sahabat seperjuangan Aryanti Indah Pratiwi dan Karlinda Lingga Sari yang selalu memberi semangat dan masukkan dalam mencari bahan penelitian.
10. Anak-anak Teater Kertas yang selalu mendukung dan menemani berproses.
11. Sahabat Trio Idiot Shofa dan Bernard yang selalu mendukung meskipun suka berantem.
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidakdapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penuli harapkanharapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulus mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengapuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 21 Nopember 2018

Puteri Widya Syahna Hidayat



RINGKASAN

Puteri Widya Syahna Hidayat, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Nopember 2018, KONFLIK PEMBERIAN KESEMPATAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Amelia Srikusumadewi, S.H., M.Kn dan Shanti Riskawati, S.H. M.Kn.

Dalam pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat konflik aturan yaitu kontrak yang dibuat sebelum 1 Juli 2018 dan kontrak yang dibuat setelah 1 Juli 2018. Kontrak yang dibuat sebelum 1 Juli 2018 menurut pasal 89 masih menggunakan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015. Menurut kedua aturan tersebut terdapat perbedaan dalam pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan kepada pihak penyedia. Hal ini dapat dilihat pada kontrak kontruksi Pasar Rakyat Galuh Cempaka yang dalam pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian menggunakan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015. Jika dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan dan asas penyelesaian konflik peraturan perundang-undangan maka bertentangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah mengenai penyelesaian penyelesaian dalam kontrak barang/jasa pemerintah dan akibat hukum terkait perbedaan pengaturan pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.

Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian normatif yuridis ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*). Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi dengan melihat kepada hubungan di antara aturan yang saling berhubungan sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Untuk mengatasi konflik aturan mengenai pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2018 menggunakan asas *Lex Superiori derogate Legi Inferiori* dan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibuat setelah 1 Juli 2018 dapat menggunakan asas *Lex Posterior derogate Legi Priori*. Akibat Hukum dalam pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah dikenakannya denda kepada pihak penyedia. Denda kontrak pengadaan barang/jasa yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2018 denda yang dikenakan adalah 1/1000 dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sesuai dengan setiap hari keterlambatan yaitu maksimal

50 hari kalender. Sedangkan pemberian jangka waktu penyelesaian berdasarkan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 maka denda yang dikenakan denda lebih dari 5%, penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan dengan nilai kontrak atau paling banyak 9% dari nilai kontrak. Untuk Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibuat setelah 1 Juli 2018 yang dikenakan adalah denda 1/1000 dari nilai kontrak atau nilai dari bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Maksimal 90 hari kalender kerja atau maksimal 90/1000 dari nilai kontrak atau nilai bagian dari kontrak.



SUMMARY

Puteri Widya Syahna Hidayat, Civil Law, Faculty of Law Universty Brawijaya, November 2018, ISSUE OVER SETTING THE TERM FOR GOVERNMENT PROCUREMENT CONTRACT, Amelia Srikusumadewi, S.H., M.Kn and Shanti Riskawati, S.H. M.Kn.

Contract, where during the term setting, conflict took place in the contract made before July 1, 2018 and that made after that date. This research is conducted to settle the arising conflict by analysing Presidential Regulation Number 54 of 2010 and its amendment concerning government procurement, Finance Minister Regulation Number 243/Pmk.05/2015 concerning Amendment of Finance Minister Regulation 194/Pmk.05/2014 concerning budget execution for incomplete project up to year-end budget. When viewed from the hierarchy of laws and regulations and the principle of settlement of conflict of legislation regulations, it is contradictory.

Based on the background stated above, the problems raised in this study are regarding the settlement of settlement in government procurement contracts and legal consequences related to differences in the arrangement of granting opportunities for settlement period in government procurement contracts according to Presidential Regulation Number 54 of 2010 and its amendment concerning government procurement, Finance Minister Regulation Number 243/Pmk.05/2015 concerning Amendment of Finance Minister Regulation 194/Pmk.05/2014 concerning budget execution for incomplete project up to year-end budget.

To answer the above problems, This is a normative juridical method which is analytical and qualitative supported by statute and analytical approaches. Legal materials related to the problem under study are obtained through library search. Legal materials that have been obtained are analyzed using the interpretation method by looking at the relationship between the rules that are interconnected so that it can be presented in a more systematic writing to answer legal issues that have been formulated.

Based on the discussion, it can be concluded that: 1) To overcome the conflict of rules regarding the granting of the opportunity for the completion of the Government Procurement Contract made before 1 July 2018 use the Lex Superiori derogate Legi Inferiori and government procurement contracts made after 1 July 2018 use the Lex Posterior derogate principle Legi Priori. Legal consequences in granting the opportunity for the period of completion of work are imposed on fines to the provider. Fines for the government procurement contract made before July 1, 2018 The penalty imposed is 1/1000 of the contract value or the value of the contract part in accordance with each day of delay, which is a maximum of 50 calendar days. Whereas the period of completion based on Finance Minister Regulation Number 243/Pmk.05/2015, fines subject to fines of more than 5%, providers of goods / services add the value of implementation guarantee so that it becomes 1/1000 multiplied by the number of days of completion of work multiplied by the contract value or at most a lot of 9% of the contract value. For government

goods / services procurement contracts made after 1 July 2018, a fine of 1/1000 of the contract value or value of the contract section for each day of delay is imposed. A maximum of 90 working calendar days or a maximum of 90/1000 of the contract value or part of the contract value.



DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penulisan.....	12
E. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kontrak	17
B. Asas-Asas dalam Hukum Kontrak.....	24
C. Persyaratan Bagi Sebuah Kontrak	28
D. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa	29
E. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa	20
F. Perpanjangan Kontrak dan Pemberian Kesempatan	31
G. Bentuk dan Jenis Kontrak Konstruksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	40
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	42
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	42

BAB IV PEMBAHASAN

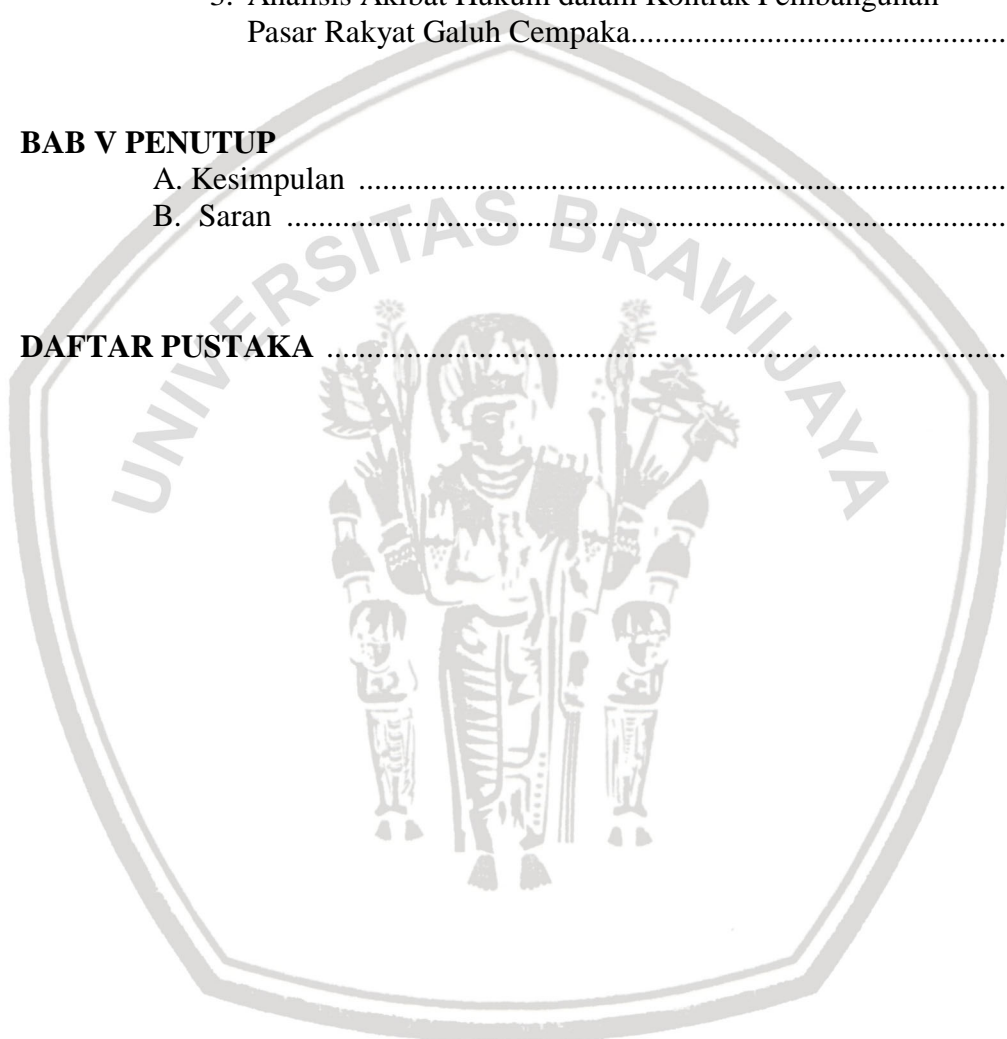
A. Posisi Kasus dalam Kontrak Pembangunan Pasar Cempaka	44
1. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka	48
B. Pemberian Kesempatan Jangka waktu Penyelesaian Kepada Pihak Penyediaan dalam Kontrak Penyedia Barang dan Jasa	55
1. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibuat Sebelum 1 Juli 2018.....	57

2. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibuat Setelah 1 Juli 2018.....	75
3. Analisis Kontrak Pembangunan Pasar Galuh Cempaka dalam Pemberian Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	81
C. Akibat Hukum Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan	87
1. Akibat Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebelum 1 Juli 2018	87
2. Akibat Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibuat Sesudah 1 Juli 2018.....	91
3. Analisis Akibat Hukum dalam Kontrak Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka.....	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA	104
-----------------------------	-----



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Originalitas Penulisan	8
Tabel 2. Tabel Perbandingan PMK 194/2014 dan PMK 243/2015	60
Tabel 3. Perbedaan tindakan atau perbuatan yang dilakukan pihak penyedia beserta akibat hukunya dalam Prespres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, PMK Nomor 243/Pmk.05/2015, dan Prespres Nomor 16 Tahun 2018	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bentuk Kontrak Konvensional.....	36
Gambar 2.	Bentuk Kontak Spesialis	37
Gambar 3.	Bentuk Kontrak Rancang Bangun	38
Gambar 4.	Skema Pemberian Kesempatan Pekerjaan	67
Gambar 5.	Masa Berlakunya Perpres Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Kontrak pengadaan barang/jasa adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. Bentuk perjanjiannya yaitu tertulis.¹ Para pihaknya yaitu PPK dengan Penyedia Barang atau pelaksana swakelola.² Pengertian ini terlalu sempit karena tidak nampak objek, hak, dan kewajiban para pihak pengadaan barang/jasa. Jika diperluas arti kontrak pengadaan barang/jasa adalah kontrak yang dibuat antara PPK dengan penyedia barang atau pelaksana swakelola dimana PPK berhak atas prestasi yang dilakukan oleh penyedia barang atau pelaksana swakelola, dan penyedia berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya yaitu menyerahkan barang sesuai dengan yang telah disepakati.³

Awalnya pengadaan barang jasa merupakan kegiatan praktis yang dapat diajarkan dan dipelajari karena sudah menjadi pengetahuan. Pengadaan barang/jasa merupakan upaya pihak PPK untuk mendapatkan dan mewujudkan barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan proses dan metode tertentu untuk mencapai kesepakatan waktu, harga, dan kesempatan lainnya yang sudah diatur dalam kontra

¹ H. Salim. H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, **Perkembangan HUKUM KONTRAK INNOMINAAT di Indonesia Buku Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 170

² *Ibid*

³ *Ibid*

pengadaan barang/jasa. Agar esensi pengadaan barang dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia harus selalu berpedoman berdasarkan filosofi pengadaan barang/jasa, mengikuti prinsip-prinsip, metode, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, dan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pengadaan barang/jasa para pihaknya terdiri dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia barang/jasa. Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaannya PPK merupakan pihak yang meminta atau memberi tugas kepada penyedia untuk membuat pekerjaan tertentu, memasok, atau membuat barang. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha (BUMN, BUMD, Swasta) atau perseorangan.⁴ pelaksana swakelola adalah kementerian/lembaga/dinas/intansi yang melaksanakan pengadaan barang, pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lainnya atau kelompok masyarakat.⁵

Pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah dalam peraturan presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif efisiensi belanja Negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD.

Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

⁴ *Ibid*, hlm. 171

⁵ *Ibid*

mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang sudah diatur dalam undang-undang. Dalam melaksanakan perjanjian harus berdasarkan dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu pihak. Pasal tersebut juga menjelaskan mengenai kekuatan perjanjian yaitu kekuatan perjanjian sama dengan undang-undang yang perjanjian dibuat oleh kedua belah pihak secara sah dan mengikat kepada kedua belah pihak.

Perjanjian dibuat secara tertulis bertujuan untuk menghindari keragu-raguan yang dapat mengakibatkan timbulnya konflik mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak.. Sebelum perjanjian dibuat, biasanya akan diawali dengan pembicaraan awal dan meningkat menjadi pembicaraan mengenai negoisasi, perencanaan dan lainnya agar mematangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sehingga kontrak yang akan ditandatangani telah lengkap, jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

Meskipun perjanjian tersebut sudah dibuat lengkap, jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak selalu terdapat kekurangan atau dapat dikatakan *nobody is perfect*. Kekurangan dalam isi pembuatan kontrak dan ada pihak-pihak yang tidak beritikad baik (*teqoeder trouw*) yang dapat mengakibatkan terjadinya sengketa para pihak dalam perjanjian tersebut.

Hubungan hukum yang timbulkan oleh kontrak disebut perikatan yang mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Dengan adanya perikatan maka timbul hak dan kewajiban para pihak. Perikatan tidak hanya dilakukan secara lisan disertai kesanggupan para pihak, tetapi sudah merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak apabila terjadi konflik

dikemudian hari. Menurut Subekti perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau dua pihak, yang di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.⁶

Kontrak pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari perjanjian kerja yaitu perjanjian pemborongan kerja yang diatur dalam KUHPerdara Buku ketiga Bab VII A mengenai perjanjian kerja menurut pasal 1601 huruf b yang mendefinisikan perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas dengan harga yang telah ditentukan. Dalam hal perjanjian pemborongan kerja umumnya dengan perjanjian pemborongan kerja dengan pemerintah tidak berbeda jauh, yang membedakan hanya para pihaknya. Perjanjian pemborongan kerja dengan pemerintah disebut juga dengan kontrak pengadaan barang dan jasa yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat hal inkonsistensi dalam menentukan perpanjangan kontrak pengadaan barang/jasa. Hal ini dapat di lihat pada Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai pemutusan kontrak menurut Pasal 93 huruf a.1 menyatakan bahwa:

“Berdasarkan Penelitian PKK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan

⁶ P.N.H. Simanjuntak, **Pokok Hukum Perdata Indonesia**, Jakarta: Djambatan, 2009, hlm. 318-319.

sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan”.⁷

Dalam keputusan kontrak secara sepihak berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Keterlambatan yang dimaksud pasal 93 huruf a.1 adalah pemberian kesempatan atau kesempatan dalam memperpanjang kontrak 50 (lima puluh) hari terhitung sejak berakhirnya kontrak. Dalam hal ini berbeda dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/Pmk.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan b menyatakan bahwa:

“Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
- b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai;”⁸

⁷ Hernold Ferry Makawimbang, **Kompilasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, libri, Jakarta, 2016, hlm. 207

⁸ Pasal 4 ayat (1), **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/Pmk.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran**, hlm. 3

Maka dapat dilihat perbedaan waktu perpanjangan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/Pmk.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.05/2014.

Berlakunya perpres yang baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sejak diundangkan pada 22 Maret 2018 maka Perpres ini berlaku dan mencabut perpres yang lama. Tetapi berdasarkan pada pasal 89, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pelaksanaan dan pelaksanaan dan kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Juli 2018 maka berlaku Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetap berlaku hingga berakhirnya kontrak. Ketidaksinkronan pemberian kesempatan kepada penyedia antara Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 akan menimbulkan konflik bagi pihak PPK dan Penyedia Barang atau Jasa.

Ini dapat di lihat dari studi kasus pada pembangunan Pasar Cempaka di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dalam surat perjanjian atau kontrak pekerjaan kontruksi yang dilakukan pihak Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru yang bertindak sebagai PPK dan PT Bina Karsyam yang bertindak sebagai Penyedia. Dalam kontrak awal pekerjaan waktu pelaksanaan 40 hari dari tanggal 13 November sampai dengan 22 Desember, kemudian diaddendum menjadi 49 kalender dan

kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2017. Tetapi pada tanggal 31 desember 2017 pihak penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dan progress fisik pengerjaan kontruksi hanya 68%. Kemudian kontraktor atau pihak penyedia memohon kepada pihak PPK untuk diberikan waktu untuk penyelesaian pekerjaan. Tetapi dalam hal ini akan menjadi masalah ketika PPK menentukan waktu pemberian kesempatan kepada pihak penyedia karena berhubungan dengan berakhirnya tahun anggaran. Dalam Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pemberian kesempatan adalah 50 (lima puluh) hari sedangkan pada PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 90 (Sembilan Puluh) hari. PPK memberi kesempatan kepada pihak penyedia 50 hari. Pemberian kesempatan 50 hari kalender dihitung dari tanggal 1 januari 2018 sampai dengan 19 februari 2018.

Sampai dengan tanggal 19 februari 2018 pekerjaan belum selesai, kemudian kontraktor atau pihak penyedia meminta lagi lagi perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya selama 40 hari kalender. PPK memberi lagi kesempatan kepada kontraktor atau pihak penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan pertimbangan agar proyek bangunan tidak mangkrak dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan perbedaan antara Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 diatas dalam pemberian kesempatan kepada penyedia 50 (lima puluh) hari atau 90 (Sembilan Puluh) hari yang akan digunakan. Dengan perbedaan diatas tersebut

maka membahas mengenai masalah yang diajukan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Konflik Pemberian Kesempatan Jangka Waktu Penyelesaian Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

Dalam penelitian ini ada beberapa judul penelitian yang peneliti jadikan sebagai acuan perbedaan mengenai Analisis Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Originalitas Penulisan

No.	Nama, Universitas, dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Reza Putra Mahardika (Universitas Brawijaya) 2013 Skripsi	Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Studi Implementasi Azas Kebebasan Berkontrak Di Balai Penelitian Tanaman Tembakau Dan Serat Malang)	a) Bagaimana penerapan azas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010? b) Apakah terdapat kesetaraan antara pihak pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam perjanjian pengadaan barang/jasa?	Perbedaan isu masalah yang diangkat oleh peneliti adalah isu masalah yang dibahas mengenai ketidaksetaraan posisi antara pihak penyedia dan pengguna barang/jasa dalam berkontraktual yang dibuat dengan menggunakan standar kontrak.
2.	Candra Setyo Perdana Putra (Universitas Brawijaya) 2015 Skripsi	Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Pengguna Jasa Konstruksi Dalam Perjanjian Pembedaan Pekerjaan	a) Apakah pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun terhadap PT. Surya Kencana Sakti dalam	Perbedaan isu masalah yang diangkat oleh peneliti dalam hal ini adalah mengenai pemutusan kontrak secara sepihak oleh pemerintah

		Dengan Penyedia Jasa Konstruksi (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/Pn.Kd.Mn)	perjanjian pemborongan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia ? b) Apakah dasar pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan untuk sebagian pada putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn sesuai dengan peraturan mengenai perjanjian pemborongan yang berlaku di Indonesia ?	madiun yang sebenarnya dalam masa kontraknya belum berakhir.
3.	Haswangga Riskian Cahya Purba (Universitas Brawijaya) 2014 Tesis	Perjanjian Kontrak Pengadaan Atau Jasa Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Dengan Swasta (Studi Kasus Pembayaran Ganti Rugi Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga	a) Bagaimana pelaksanaan ganti rugi terkait kontrak pengadaan barang atau jasa berdasarkan peraturan presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten	Perbedaan isu masalah yang diangkat oleh peneliti dalam hal ini adalah mengenai pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Daerah Nganjuk tidak dapat melunasi pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan

		Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk)	<p>Nganjuk kepada Swasta?</p> <p>b) Hambatan apa yang dihadapi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk terkait pembayaran ganti rugi dengan Swasta dalam Kontak Pengadaan Barang dan Jasa?</p> <p>c) Upaya apa yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk untuk mengatasi hambatan terkait pembayaran ganti rugi dengan swasta dalam kontrak Pengadaan Barang dan Jasa ?</p>	Keluarga tidak mengangarkan ganti kerugian kedalam anggaran.
--	--	--	---	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian konflik aturan mengenai pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian dalam kontrak barang/jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran?
2. Apa akibat hukum terkait perbedaan pengaturan pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis penyelesaian konflik aturan mengenai pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian dalam kontrak barang/jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat

Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.

2. Untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis akibat hukum terkait perbedaan pengaturan pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat teoritik dan manfaat praktis. Manfaat teoritik berhubungan dengan pengembangan keilmuan di bidang hukum, sedangkan manfaat praktis berhubungan dengan penerapan dalam kehidupan bangsa.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. penelitian skripsi ini dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang penyelesaian

konflik mengenai pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.

- b. Memberikan informasi dan pengetahuan mengenai akibat hukum terkait perbedaan pengaturan pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai informasi, pengetahuan dan pemahaman dalam mengadakan kontrak pengadaan barang dan jasa yang baik dan benar agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman bagi pihak PPK dan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dalam menyelesaikan konflik pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbaikan dan masukan kepada pihak pembuat peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terutama mengenai pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa khususnya kontrak konstruksi.

E. Sistematika Penulisan

Peneliti membuat sistematika penulisan dalam menyajikan hasil penelitian ini, yang tersusun atas beberapa bab dan diperjelas kembali dalam sub bab, adapun isi atau uraiannya, antara lain:

BAB I : Bagian pendahuluan yang di dalamnya memuat judul dan uraian latar belakang, berikut dengan paparan fakta dan konsep, dilanjutkan dengan permasalahan, tujuan, dan manfaat dilakukannya penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka mengenai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam bab ini mengulas mengenai hal-hal yang perlu dikaji dan berkaitan dengan judul serta permasalahan tentang asas dalam kontrak pengadaan barang/jasa, jenis dan bentuk kontrak pengadaan barang, dan tahap pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa dan struktur dari sebuah kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB III : Peneliti menggunakan metode penelitian berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum yang digunakan serta sumber bahan hukum, teknik pengumpulan

bahan hukum tersebut, teknik analisa yang digunakan dalam penelitian serta definisi konseptual dari judul untuk memperjelas pengertian dari judul yang diangkat oleh peneliti.

BAB IV : Bagian hasil dari pembahasan yang Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam bab ini membahas tentang posisi kasus dalam kontrak pembangunan Pasar Rakyat cempaka, pemberian kesempatan dan akibat dari pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan menurut Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PMK Republik Indonesia Nomor 243/Pmk.05/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat dalam bagian kajian pustaka, sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

BAB V : Bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitiannya kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Kontrak

Didalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan secara tegas mengenai pengertian kontrak, tetapi menurut para pakar hukum bahwa kontrak adalah suatu peristiwa hukum seseorang sepakat terhadap orang lain atau dua orang atau lebih untuk melakukan suatu prestasi atau objek perjanjian atau tidak melakukan sesuatu.⁹ Pengaturan umum tentang kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III tentang perikatan.

Pengadaan barang/jasa antara perorangan/badan hukum dengan perorangan/badan hukum, diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi tidak diatur secara khusus. Dalam hal terjadi kesepakatan antara para pihak untuk melakukan pengadaan barang/jasa, harus sesuai dengan persyaratan perjanjian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Istilah kontrak atau perjanjian adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu *Contract Law*, sedangkan dari bahasa Belanda disebut dengan istilah *Verbintennissenrecht* atau istilah lainnya *Overeenscomstrecht* yang berarti setuju atau sepakat.¹⁰ Istilah *verbintenis* dan *Overeenscomst* dalam keputusan hukum Indonesia diterjemahkan sebagai berikut:¹¹

⁹ Ahmadi Miru, **Hukum Kontrak Perancangan Kontrak**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.2

¹⁰ Salim H.S, **Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. II**, Sinar Grafika, Jakarta:, 2004, hlm.3

¹¹ Firman Floranta Adonara, **Aspek-Aspek Hukum Perikatan**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm.2

1. KUHPerdata, **Subekti dan Tjiptosudibio** menggunakan istilah perikatan untuk *verbinten*is dan persetujuan untuk *overeenkomst*;
2. Utrecht, dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia menggunakan istilah perikatan untuk *verbinten*is dan perjanjian untuk *overeenkomst*;
3. **Achmad Ichsan**, dalam bukunya Hukum Perdata, menerjemahkan *verbinten*is dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan.

Perjanjian merupakan peristiwa seseorang membuat kesepakatan kepada seorang lainnya atau dua orang itu saling sepakat untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu.¹² Dari peristiwa tersebut muncul hubungan antara dua orang tersebut yang disebut perikatan. Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Meskipun dalam KUHPerdata pengertian perikatan tidak dijelaskan secara tegas, tetapi dalam Pasal 1233 KUHPerdata menegaskan bahwa perikatan selain dari Undang-undang perikatan dapat juga lahir dari perjanjian. Perjanjian merupakan perikatan sedangkan perikatan belum tentu merupakan perjanjian. Dengan kata lain, bila pengertian pasal 1313 KUHPerdata dihubungkan dengan pasal 1233 KUHPerdata, maka pengertian dari perikatan itu dapat lahir melalui perjanjian itu sendiri.

¹² Subekti, **Hukum Perjanjian Cet. XII**, PT. Intermedia, Jakarta, 1990, hlm. 1

Menurut **Subekti** didalam buku Hukum Perjanjian tentang perbedaan pengertian dari perikatan dengan perjanjian mengartikan dari perikatan sebagai berikut.¹³

“ Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”¹⁴
“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹⁵

Perjanjian dapat mengikat dan mempunyai akibat hukum apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang melahirkan perikatan. Dengan kata lain antara perjanjian dan perikatan mempunyai kaitan yang penting karena perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Namun dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa sumber-sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Dalam Pasal 1352 KUH Perdata bahwa perikatan lahir melalui undang-undang bisa dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia. Perbuatan ada dua macam, yaitu perbuatan yang diperbolehkan oleh undang-undang dan perbuatan melawan hukum yang disebut *Onrechtmatige Daad*.

Perbedaan perikatan dan perjanjian dapat terlihat pada akibat hukumnya. Masing-masing para pihak mempunyai hak menuntut pelaksanaan prestasi dari pihak yang telah terikat pada perjanjian tersebut.

Pada perjanjian tidak secara tegas menjelaskan mengenai hak hukum yang dimiliki para pihak yang ada di perjanjian tersebut. Jika salah satu dari pihak ternyata ingkar janji karena pengertian perjanjian itu sendiri yang terdapat pada

¹³ R. Subekti, **Hukum Perjanjian, Cetakan Ke- XII**, Intermasa, Jakarta, 1990, hlm.9

¹⁴ *Ibid*, hlm. 9

¹⁵ R.Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm.123.

Pasal 1313 KUH Perdata menimbulkan pendapat bahwa perjanjian tersebut hanya perjanjian sepihak. Pengertian dalam pasal 1313 KUH Perdata menggambarkan bahwa tindakan seseorang atau lebih sepakat mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih tidak hanya merupakan perbuatan hukum yang mengikat tetapi bisa pula merupakan perbuatan tanpa akibat hukum.

Akibat hukum yang muncul dari dua pengertian diatas bahwa oleh karena perjanjian berdasarkan kesepakatan oleh para pihak, maka tidak terpenuhinya prestasi dalam perjanjian yang sudah disepakati memunculkan wanprestasi, sedangkan tidak terpenuhinya prestasi dalam perikatan memunculkan akibat hukum yang disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Pemahaman tersebut menjelaskan adanya perbedaan pengertian perjanjian dan perikatan hanya berdasarkan luasnya pengertian perikatan dibandingkan pengertian perjanjian. Berarti dalam perjanjian memiliki “arti sebagai hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih dimana satu pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian”. Apabila salah satu pihak dalam perikatan tersebut tidak atau terlambat melaksanakan prestasi, akibat dari perbuatan melawan huku pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pihak tersebut untuk melakukan pemenuhan prestasi atau ganti kerugian. Ganti kerugian bisa berupa ganti rugi, bunga, dan biaya.

Uraian diatas bahwa perikatan meliputi dua arti, yaitu pertama perjanjian yang akibat hukumnya tergantung kepada para pihak yang terikat pada perjanjian tersebut. Kedua, perikatan yang memiliki akibat hukum yang jelas. Meskipun perjanjian yang muncul dari perikatan tersebut tidak berasal dari undang-undang, ia juga mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan perikatan yang

dari undang-undang dan berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang diikat didalamnya.¹⁶

Pasal 1320 KUH Perdata, ada 4 (empat) syarat yang harus di penuhi untuk sahnya suatu perjanjian yaitu :¹⁷

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Adapun unsur-unsur yang ada di hukum perjanjian/kontrak dapat dikemukakan sebagai berikut :¹⁸

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum perjanjian terbagi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis maksudnya kaidah hukum yang ada dalam traktat, undang-undang, dan yurisprudensi. Sedangkan perjanjian tidak tertulis merupakan kaidah hukum yang muncul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.¹⁹

2. Subjek hukum

Istilah subjek hukum adalah *rechtsperson* yang diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum kontrak adalah kreditur (orang yang berpiutang) dan debitur (orang yang berutang).

¹⁶ Ade Sanjaya, 2015, **Pengertian Kontrak Definisi Menurut KUH Perdata dan Unsur** (online) <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-kontrak-definisi-menurut-kuh.html>. (5 Desember 2017)

¹⁷ Soedharyo Soimin, Pasal 1320, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 329

¹⁸ Salim HS, op.cit, hlm. 4.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 4

3. Adanya Prestasi

Prestasi adalah hak kreditur dan kewajiban debitur. Suatu prestasi umumnya terdiri dari beberapa hal sebagai berikut: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu²⁰.

4. Kata Sepakat

Pada Pasal 1320 KUH Perdata ada 4 (empat) syarat sah perjanjian. Salah satunya konsensus atau kesepakatan. Kesepakatan maksudnya menyamakan kehendak antara para pihak yang akan melakukan perikatan²¹.

5. Akibat Hukum

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak memunculkan akibat hukum. Akibat hukum yang timbul adalah hak dan kewajiban.²² Kesepakatan yang diatur dalam perjanjian mengikat para pihaknya.

Suatu perjanjian atau kontrak merupakan peristiwa seseorang sepakat terhadap orang lain atau lebih sepakat untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian atau kontrak diatur di dalam buku III KUH Perdata. Sebagai wujud tertulis dari kontrak, kontrak dapat menimbulkan perikatan. Perikatan merupakan suatu keadaan hukum dengan hak dan kewajiban berkaitan satu sama lain.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata yaitu²³:

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ Ahmadi Miru, **Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW**, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 4

- a. Perjanjian untuk memberikan / menyerahkan sesuatu barang;
- b. Perjanjian untuk melakukan sesuatu;
- c. Perjanjian untuk tidak melakukan sesuatu.

Perjanjian didalam Pasal 1313 KUH Perdata diartikan:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”²⁴.

Namun pengertian kontrak menurut Pasal 1313 KUH Perdata tidak lengkap dan hanya mencakup kontrak sepihak. Sedangkan kontrak lainnya atau lebih tidak harus untuk mengikatkan diri kepada pihak pertama. Selain itu pengertian kontrak menurut Pasal 1313 KUHPdata terlalu luas karena jika dinterpertasikan dapat mencakup hukum keluarha dan perbuatan hukum. Tetapi berbeda sifatnya yang ada dalam buku III KUH Perdata yang merupakan perbuatan hukum dalam lapangan harta kekayaan. Yang dapat menjadi kriteria dasar adalah dapat dinilai secara materil ekonomis.

Menurut **Erman Radjagukguk** kontrak pada dasarnya merupakan dokumen tertulis yang memuat keinginan para pihak untuk mencapai tujuan komersialnya, dan bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi atau dibatasi tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan tersebut.²⁵ Melalui kontrak tercipta hak dan kewajiban untuk para pihak. Mereka terikat pada kontrak tersebut. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan undang-undang yang hanya mengikat kepada para pihak yang telah membuat kontrak tersebut.

Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata dinyatakan bahwa :

²⁴ Soedharyo Soimin, Pasal 1313, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 328

²⁵ Erman Radjagukguk, **Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik Indonesia**, dalam **Peter Mahmud Marzuki, dkk (ed), Jual Beli Barang secara Internasional**, Proyek ELIPS, Jakarta, 1998, hlm.122

“ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”²⁶.

Kontrak dibuat dengan asas kebebasan berkontrak sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Menurut pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata para pihak bebas untuk :²⁷

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis ataupun lisan.

Hukum kontrak menganut *open system* (sistem terbuka). *Open system* diartikan bahwa setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian yang sudah diatur undang-undang maupun tidak diatur undang-undang.

B. Asas-Asas dalam Hukum Kontrak

Asas-asas dalam hukum kontrak terdiri dari:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Diartikan bahwa setiap orang membuat kontrak yang mereka inginkan, selama syarat-syarat yang diatur undang-undang dan tidak melanggar ketentuan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Semua perjanjian apapun, mengadakan dengan siapapun, isi perjanjian, bahkan para pihak juga bebas untuk membuat atau

²⁶ Soedharyo Soimin, Pasal 1338 ayat (1), **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 332

²⁷ Ahmadi Miru, Op. Cit., hlm.8

tidak membuat perjanjian. Namun kebebasan tersebut tetap ada batasnya, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan kontrak, antara lain:²⁸

- a) bebas menentukan melakukan perjanjian atau tidak;
- b) bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c) bebas menentukan isi klausula perjanjian;
- d) bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- e) kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

b. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Menurut pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa kontrak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat layaknya undang-undang. Namun hanya mengikat kepada para pihak yang menandatangani.

Setiap orang yang membuat kontrak, ia terikat untuk memenuhi prestasi yang ada di dalam kontrak tersebut. Karena mengandung prestasi yang harus dipenuhi dan prestasi tersebut mengikat para pihak seperti layaknya undang-undang. Hal ini pada pasal diatas bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.²⁹

²⁸ Ahmadi Miru, **Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 4

²⁹ *Ibid*, hlm. 3

c. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu kontrak diperlukan empat syarat. Syarat pertama adalah “Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming*)”. Harus ada kesepakatan antara para pihak yang mengikat diri pada perjanjian tersebut. Konsensualisme berarti kesepakatan (*consensus*). Pada dasarnya kontrak dan perikatan yang lahir sejak tercapainya kata sepakat. Kesepakatan ini ditekankan kehendak para pihak (*meeting of mind*) dari hukum kontrak. Perjanjian dianggap tidak ada apabila terjadi karena paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), atau kekhilafan (*dwaling*).³⁰ Kontrak yang lahir dan mengikat para pihak ketika adanya kesepakatan mengenai pokok kontrak atau disebut esensialia perjanjian. Formalitas tertentu tidak lagi diperlukan dalam membuat perjanjian. Adanya pengecualian terhadap prinsip ini dapat terjadi dalam hal undang-undang memberikan syarat tertentu formalitas pada kontrak yang harus dibuat tertulis. Contoh: Akta Perdamaian.

d. Asas *Good Faith/Tegoeder Trouw* (Itikad Baik)

Menurut pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik. Itikad baik (*te goeder trouw, good faith*) mempunyai pengertian yaitu keadaan batin para pihak untuk membuat dan melaksanakan kontrak secara jujur, saling percaya, dan terbuka.³¹ Keadaan batin para pihak tidak boleh ada maksud untuk melakukan menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya atau tipu daya.

³⁰ Firman Floranta, Op.Cip., hlm. 98

³¹ *Ibid*, hlm. 105

e. Asas Kepribadian (*Personality*)

Kontrak yang dibuat hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak lain diluar kontrak yang telah ditentukan. Kontrak dibuat bertujuan untuk hanya untuk kepentingan personal para pihak yang ada dalam kontrak.³² Seseorang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dalam membuat perjanjian. Pasal 1314 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau minta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”

Perjanjian dibuat hanya berlaku bagi mereka para pihak yang membuatnya. Asas Kepribadian juga ada pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan :³³

“ Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Yang dimaksud pada pasal diatas ialah seseorang melakukan perjanjian hanya untuk kepentingannya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan bahwa:³⁴

”Perjanjian hanya berlaku antar pihak yang membuatnya.”

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Kecuali pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata dapat dilihat Pasal 1317 KUHPerdata menyatakan bahwa : “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.

³² Salim HS, Op. Cit., hlm. 12

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

C. Persyaratan Bagi Sebuah Kontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata jelas bahwa perjanjian yang mengikat hanyallah perjanjian yang sah. Agar sah dalam membuat kontrak harus berpedoman pada Pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 syarat sahnya suatu kontrak, yaitu:

- a. Kesepakatan : untuk memperoleh suatu kontrak yang baru dilaksanakan, para pihak harus saling menerima kesepakatan. Kesepakatan ini mensyaratkan adanya suatu Pihak yang menawarkan (*Offeror*) Pihak yang ditawari (*Offeree*) penawaran (*Offer*) oleh pihak yang menawarkan (*Offeror*) dan penerimaan (*Acceptance*) dari pihak yang ditawari (*Offeree*). Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan, dan kekhilafan³⁵.
- b. Kecakapan: para pihak yang membuat kontrak harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pada dasarnya menurut hukum semua orang cakap dan dapat membuat kontrak. Orang yang tidak cakap adalah orang-orang yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu meliputi anak-anak, orang yang dibawah pengampuan (perwalian), dan orang sakit jiwa.³⁶
- c. Hal tertentu : yang dimaksud hal tertentu adalah objek harus jelas, dan dapat ditentukan. Jadi tidak boleh samar-samar atau tidak jelas. Hal ini penting untuk memberikan kepastian untuk para pihak dan mencegah timbulnya kontra fiktif. Semakin jelas objek yang diperjanjikan semakin

³⁵ Adrian Sutedi, **Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 68

³⁶ *Ibid*

baik.³⁷ Obyek kontrak haruslah sah atau tidak melawan hukum. Kontrak yang diadakan untuk mencapai tujuan-tujuan atau obyek illegal, atau kontrak-kontrak yang berlawanan atau bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah menjadi batal.

- d. Sebab yang dibolehkan isi kontrak tidak bertentangan dengan undang-undang yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, kesusilaan dan norma-norma yang telah hidup dimasyarakat.³⁸

D. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa

Merupakan kontrak yang dibuat antara PPK dengan penyedia barang atau pelaksana swakelola dimana PPK berhak atas prestasi yang dilakukan oleh penyedia barang atau pelaksana swakelola, dan penyedia berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya yaitu menyerahkan barang sesuai dengan yang telah disepakati.³⁹

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.⁴⁰

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

³⁹ H. Salim. H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm 170

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 171

E. Pemutusan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Pemutusan kontrak adalah berakhirnya kontrak pengadaan barang yang telah ditandatangani antara PPK dan Penyedia Barang.⁴¹ Pemutusan Kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam:⁴²

- a. Adanya wanprestasi;
- b. Adanya unsur kesalahan.

Pemutusan kontrak karena wanprestasi merupakan pemutusan kontrak yang disebabkan karena penyedia barang tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah tertuang didalam kontrak. Yang termasuk dalam pemutusan kontrak karena wanprestasi, meliputi:⁴³

- a. Tidak dapat menunda kebutuhan barang melebihi batas berakhirnya kontrak;
- b. Penyedia barang tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan meskipun PPK sudah memberikan jangka waktu kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. Penyedia barang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan; dan
- d. Penyedia barang cidera/lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang sudah diatur dalam perjanjian dan tidak memperbaiki kelalaiannya atau kesalahannya sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh PPK.

Untuk pemutusan kontrak dilakukan lewat pemberitahuan tertulis yang dibuat PPK atau penyedia apabila salah satu dari mereka melanggar ketentuan kontrak atau

⁴¹ *Ibid*, hlm. 193

⁴² *Ibid*, hlm. 194

⁴³ *Ibid*

wanprestasi dapat mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara. Akibat wanprestasi ini pihak yang melakukan wanprestasi dikenakan sanksi sesuai ketentuan kontrak yang sudah meraka sepakati.

Berdasarkan uraian di atas bahwa :

1. Berakhirnya kontrak dapat berupa penghentian kontrak, penyelesaian kontrak, atau pemutusan kontrak.
2. Pemutusan kontrak merupakan akibat dari sanksi apabila salah satu pihak wanprestasi.

F. Perpanjangan Kontrak dan Pemberian Kesempatan

Banyaknya kekeliruan pemahaman antara para pihak yang membuat kontrak pengadaan barang dan jasa antara perpanjangan kontrak dengan pemberian kesempatan. Dalam hal ini banyak menimbulkan sengketa akibat kekeliruan atau kesalah pemahaman mengenai perpanjangan kontrak dan pemberian kesempatan.⁴⁴

Adapun untuk perubahan kontrak yang berupa perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan karena adanya perubahan *force majeure*, peristiwa kompensasi, dan/atau kondisi lapangan. yang menuntut perpanjangan waktu pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Berbeda dengan definisi pemberian kesempatan yaitu PPK memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia yang terjadi akibat keterlambatan karena kesalahan penyedia barang/jasa.

Untuk penyebab perpanjangan waktu kontrak yaitu adanya keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam, peristiwa kompensasi, dan perubahan kondisi

⁴⁴ LKPP, Direktorat Penangan Permasalahan Hukum, **Perpanjangan Waktu dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan**, 2017, hlm. 3

lapangan. Sedangkan penyebab adanya pemberian kesempatan pekerjaan adalah adanya keterlambatan akibat kesalahan pihak penyedia barang/jasa.

Persyaratan untuk memperpanjang kontrak sendiri diatur dalam beberapa kriteria yaitu:⁴⁵

a. Kriteria *Force Majeure*⁴⁶

1. Adanya pernyataan *force majeure* dari instansi berwenang seperti: bencana alam, kerusuhan, bencana sosial, gangguan industri, dan kejadian luar biasa.
2. *Force majeure* yang diluar tidak diperlukan pernyataan dari instansi yang berwenang. Tetapi diperlukan data atau bukti telah terjadi *force majeure*. Seperti: pemotongan anggaran oleh kementerian keuangan, terjadi kondisi yang tidak dapat dikendalikan oleh para pihak, atau data curah hujan dari BMKG.
3. Kejadian *force majeure* yang menuntut perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

b. Kriteria Peristiwa Kompensasi⁴⁷

1. PPK merubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
2. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3. PPK tidak memberikan spesifikasi, gambar-gambar, atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

⁴⁵ *Ibid*, hlm.6

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 7

⁴⁷ *Ibid*,

4. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia melakukan pengujian tambahan yang setelah dilakukannya pengujian ternyata tidak ditemukan penyimpangan, kerusakan, atau kegagalan.
5. PPK memerintahkan kepada penyedia untuk melakukan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
6. Ketentuan lain yang tercantum didalam SSKK.

Untuk persyaratan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan ada beberapa syarat yaitu:⁴⁸

1. Pemberian kesempatan yang tidak melampaui tahun anggaran:
 - a. Dilarang merencanakan sebelum terjadi penandatanganan kontrak;
 - b. Analisis PPK yang menyatakan lebih efisien dan bermanfaat apabila penyedia diberi kesempatan jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik;
 - c. Penyedia akan dinilai berdasarkan data yang telah diterima PPK dan penyedia membuat pernyataan tertulis sanggup dapat menyelesaikan pekerjaannya apabila diberi kesempatan.
2. Pemberian kesempatan yang melampaui tahun anggaran:
 - a. Dilarang merencanakan sebelum terjadi penandatanganan kontrak;

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 8

- b. Analisis PKK yang menyatakan lebih efisien dan bermanfaat apabila penyedia diberi kesempatan jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik;
- c. Penyedia akan dinilai berdasarkan data yang telah diterima PPK dan penyedia membuat pernyataan tertulis sanggup dapat menyelesaikan pekerjaannya apabila diberi kesempatan;
- d. Apabila ada dapat memperpanjang jaminan pelaksanaan;
- e. Penyedia akan dinilai berdasarkan data yang telah diterima PPK dan penyedia membuat pernyataan tertulis sanggup dapat menyelesaikan pekerjaannya maksimal 90 hari kalender apabila diberi kesempatan dan bersedia dikenakan denda keterlambatan; dan
- f. “PA/KPA menyatakan bersedia mengalokasikan anggaran pada tahun berikutnya untuk embayar isa pekerjaan yang diselesaikan pada tahun berikutnya”.

Adapun perbedaan antara perpanjang kontrak dan pemberian kesempatan adalah terletak pada addendum kontrak. Untuk perpanjangan kontrak diperlukan addendum/ perubahan kontrak sedangkan untuk pemberian kesempatan tidak diperlukan addendum perpanjangan waktu dan khusus untuk pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran diperlukan addendum perubahan pembebanan anggaran. Waktu dilakukannya perpanjangan kontrak dan pemberian kesempatan adalah sebelum masa kontrak berakhir.

G. Bentuk dan Jenis Kontrak Konstruksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Banyaknya jenis dan standar kontrak yang berkembang dalam industri konstruksi memberikan beberapa alternatif pada pihak pemilik untuk memilih jenis dan standar kontrak yang akan digunakan. Beberapa jenis dan standar kontrak yang berkembang diantaranya adalah *Federation Internationale des Ingenieurs Counseils* (FIDIC), *Joint Contract Tribunal* (JCT), *Institution of Civil Engineers* (I.C.E), *General Condition of Goverment Contract for Building and Civil Engineering Works* (GC/Works), dan lain-lain. Bentuk kontrak konstruksi bermacam-macam dipandang dari aspek-aspek tertentu. Ada 4 (empat) aspek atau sisi pandang bentuk kontrak konstruksi, yaitu:⁴⁹

1. Aspek Perhitungan Biaya,
2. Aspek Pehitungan Jasa,
3. Aspek Cara Pembayaran, dan
4. Aspek Pembagian Tugas.

Bentuk dan jenis kontrak yang dilihat dari segi aspek pembagian tugas sendiri dibagi menjadi beberapa poin, yakni :⁵⁰

- a. Bentuk kontrak konvensional,
- b. Bentuk kontrak spesialis,
- c. Bentuk kontrak rancang bangun (*design construction/built, turn-key*),
- d. Bentuk kontrak *engineering, procurement* dan *construction* (EPC),
- e. Bentuk kontrak BOT/BLT, dan

⁴⁹ Renhard Manurung, 2016, **Bentuk-Bentuk Kontrak Kontruksi** (Online), <https://konstruksiperkerasanjalaraya.blogspot.co.id/2016/03/bentuk-bentuk-kontrak-konstruksi.html>, (18 Desember 2017)

⁵⁰ *Ibid*

f. Bentuk swakelola (*force account*).

Penjelasan tentang keenam poin tersebut akan dijelaskan terpisah di bawah.

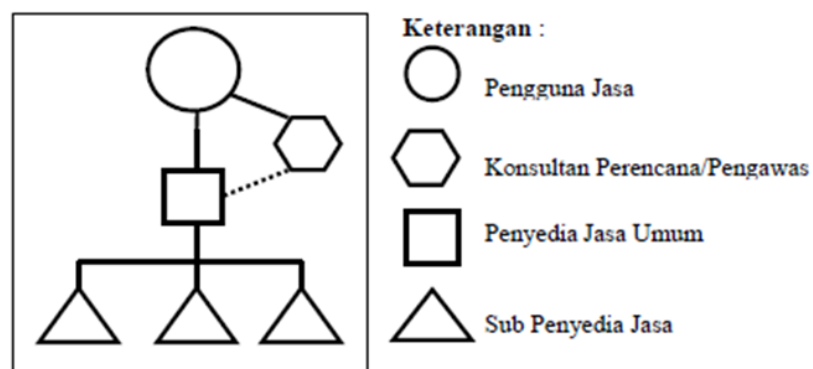
a. Bentuk Kontrak Konvensional

Pengguna Jasa menugaskan Penyedia Jasa untuk melaksanakan salah satu aspek pembangunan saja. Setiap aspek satu Penyedia Jasa dimana perencanaan, pengawasan, pelaksanaan dilakukan Penyedia Jasa yang berbeda. Oleh karena itu pengawas pekerjaan secara khusus diperlukan untuk mengawasi pekerjaan Penyedia Jasa.⁵¹

Jadi terdapat 3 kontrak terpisah yaitu :

1. Kontrak Perencanaan
2. Kontrak Pengawasan
3. Kontrak Pelaksanaan.

Gambar 1. Bentuk Kontrak Konvensional



**Bagan Organisasi Penyedia Jasa Umum
(Gilbreath 1992)**

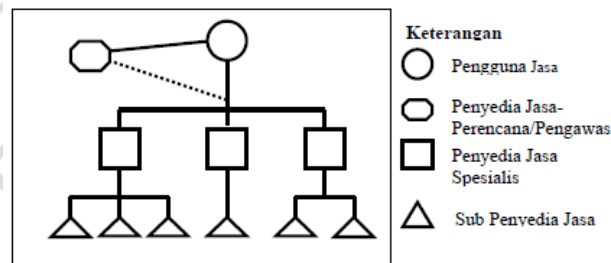
⁵¹ *Ibid*

b. Bentuk Kontrak Spesialis

Penggunaan jasa menandatangani kontrak dengan beberapa perusahaan spesialis untuk masing-masing keahlian. Keuntungan dari kontrak ini adalah:⁵²

1. Mutu pekerjaan lebih handal,
2. Penghematan waktu, dan
3. Keleluasaan dan kemudahan mengganti penyedia jasa.

Gambar 2. Bentuk Kontak Spesialis



Bagan Organisasi Penyedia Jasa Spesialis
(Gilbreath 1992)

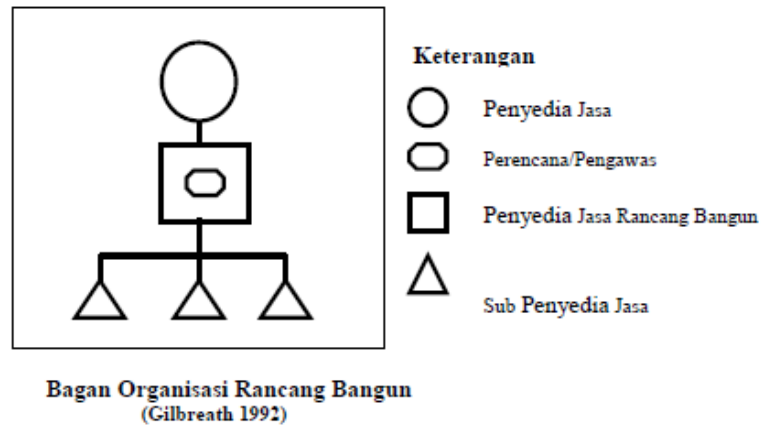
c. Bentuk Kontrak Rancang Bangun (*design construction/built, turn-key*)

Dalam bentuk kontrak ini, penyedia jasa bertugas membuat perencanaan yang lengkap dan melaksanakannya dalam suatu kontrak konstruksi. Perbedaan antara *design construction/built*, dan *turn-key* adalah dari sistem pembayarannya, dimana pada *design construction/built* pembayaran secara term sesuai pekerjaan. Sedangkan *key-turn* pembayarannya sekaligus setelah pekerjaan selesai.⁵³

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

Gambar 3. Bentuk Kontrak Rancang Bangun



d. Bentuk Kontrak *Engineering, Procurement dan Construction* (EPC)

Proses mulai dari perencanaan, pengadaan dan peralatan dan pemasangan/ pengerjaan menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Pengguna jasa hanya memberikan TOR atau pokok-pokok acuan tugas. Kontrak ini biasa dipakai untuk pembayaran pekerjaan-pekerjaan dalam industri.⁵⁴

e. Bentuk Kontrak BOT/BLT

Investor membangun pada lahan pemilik (*Build*). Investor mengelola selama kurun waktu tertentu (*Operate*). Setelah masa pengoperasian selesai fasilitas tersebut dikembalikan kepada pemilik (*Transfer*).⁵⁵

f. Bentuk Swakelola (*Force Account*)

Suatu tindakan pemilik proyek yang melibatkan diri dan bertanggung jawab secara langsung dalam pelaksanaan proyek tersebut.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Bagusprahutdi, 2012, **Bentuk Dan Jenis Kontrak Berdasarkan Aspek Pembagian Tugas** (Online), <https://sastrasipilindonesia.wordpress.com/2012/02/15/bentuk-dan-jenis-kontrak-berdasarkan-aspek-pembagian-tugas/> (17 Desember 2017)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian yang digunakan hingga cara menganalisis hasil penelitian. Metode penelitian memuat:

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian Analisis Hukum Kontrak Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PMK RI Nomor 243/Pmk.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵⁷ Penelitian ini bersifat analisis data kualitatif, yakni menguraikan dan menjelaskan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang terkait dengan penelitian ini.

⁵⁷ Johnny Ibrahim, **Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006, hlm. 295

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelusuran guna memahami permasalahan dan pencarian atas solusi yang tepat, maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan sangat mutlak diperlukan dalam penelitian hukum, mengingat yang menjadi fokus sekaligus tema sentral adalah aturan hukum. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang melakukan kajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sentral penelitian.⁵⁸

2. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pada dasarnya, analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.⁵⁹ Pada penelitian ini akan meneliti mengenai tinjauan mengenai kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kedudukan para pihak, serta analisis hukum terhadap kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diurut secara

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 295

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 311

hierarki. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifatnya autoritatif atau mempunyai otoritas. Dikatakan bahwa bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi; undang-undang, putusan hakim, peraturan eksekutif/administratif⁶⁰. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini adalah:

- a. Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 93 dan Pasal 120).
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 56, Pasal 89, Pasal 91).
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/Pmk.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari penjelasan peraturan perundang-undangan maupun buku / literatur lain yang digunakan.⁶¹ Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti, yaitu:

- a. Studi pustaka mengenai pendapat para ahli hukum kontrak dan

⁶⁰ I Made Pasek Diantha, **Metodelogi Penelitian Hukum Normatif**, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hlm. 143

⁶¹ *Ibid*, hlm. 144

hukum kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tema yang diteliti dan ditulis peneliti.

- b. Bahan-bahan hukum dari jurnal-jurnal ilmiah, artikel, majalah yang berkaitan dengan kontrak pengadaan barang dan jasa, dan internet yang berkaitan dengan judul yang akan ditulis peneliti.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Bahan hukum primer penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan mengatur mengenai kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber-sumber terkait, meliputi Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Surat kabar, internet dan koleksi pribadi peneliti.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

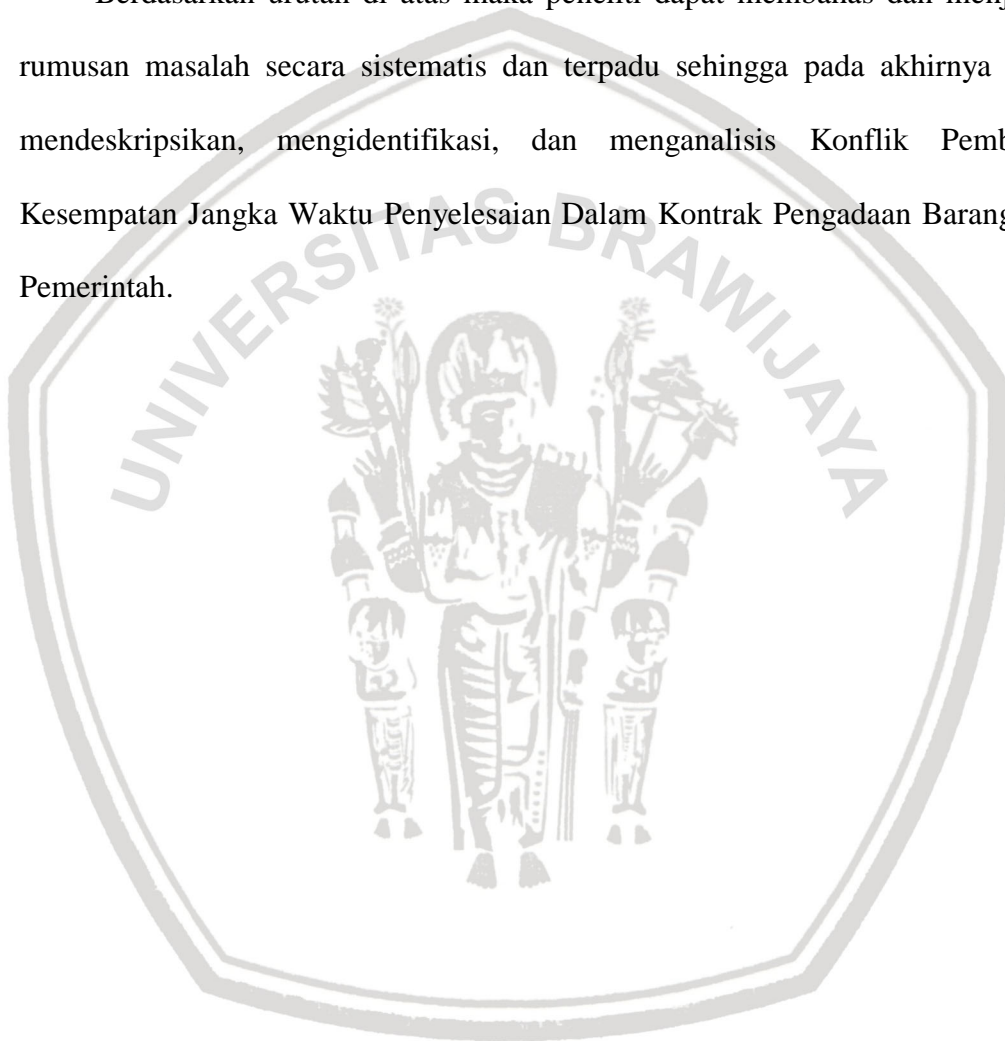
Bahan-bahan hukum dikategorikan, disusun secara sistematis, dianalisis dengan menggunakan interpretasi dengan urutan:

1. Menganalisis bahan primer terlebih dahulu dengan menggunakan cara mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis yang ada pada kerangka teoritis yang telah dibuat oleh peneliti;
2. Pendapat para pakar dan hasil wawancara dengan narasumber, selanjutnya digunakan untuk menganalisa bahan hukum secara lebih

dalam. Sebagai penguat dan dasar gramatikal, digunakan kamus atau ensiklopedia.

Bahan hukum dan non-hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, yaitu interpretasi dengan melihat kepada hubungan di antara aturan yang saling berhubungan.

Berdasarkan urutan di atas maka peneliti dapat membahas dan menjawab rumusan masalah secara sistematis dan terpadu sehingga pada akhirnya dapat mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis Konflik Pemberian Kesempatan Jangka Waktu Penyelesaian Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus dalam Kontrak Pembangunan Pasar Cempaka

Posisi kasus pada pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan paket kontruksi Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka Kota Banjarbaru dengan Nomor 005/001/Kontrak/PPK/Disdag/2017. Perjanjian ini ditandatangani di Banjarbaru pada Senin tanggal 13 (tiga belas) November 2017. Dalam surat perjanjian pengadaan barang/jasa disebut juga dengan “Pekerjaan Kontruksi” yang dilakukan oleh Rachmat Hidayat, S.H atas nama Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru yang berkedudukan di Jalan Panglima Barut Nomor 08, Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 1070/M-DAG/KEP/9/2017 tanggal 5 September 2017 yang bertindak sebagai PPK dan Syam S. Abdul Muis, Direktur Utama bertindak atas nama PT Bina Karsyam yang berkedudukan di Jalan Tanjung Tutura No.48 Kel. Tutura Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan akta anggaran dasar/pendirian No. 7 tanggal 05 November 2008 yang selanjutnya bertindak sebagai Penyedia.

Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka di Kota Banjarbaru merupakan kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistic perdagangan yang didanai dengan dana tuga pembantuan (TP) anggaran APBN Tahun anggaran 2017 pada dinas perdagangan Kota banjarbaru dengan pagu anggaran sebesar RP. 6.000.000.000,00- (enam miliar rupiah) dengan gamabar

DED Prototipe dari kementerian perdagangan, untuk mewujudkan pembangunan tersebut dilakukan dengan metode e-lelang pemilihan umum dengan pascakualifikasi yang dilakukan prosesnya oleh Pokja (Tim Panitia Pengadaan Barang Jasa Tugas Pembantuan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru). Selanjutnya dengan SK Menteri Perdagangan RI Nomor 1070/M-DAG/KEP/9?2017 tentang perubahan kedua atas putusan menteri perdagangan Nomor 709/M.DAG/KEP/5/2017 tentang penetapan pejabat pengelolaan keuangan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2017 tanggal 5 september 2017 yang diterima pada akhir bulan september

Disini PPK meminta Penyedia untuk melakukan “Pekerjaan Kontruksi” sesuai yang telah dijelaskan didalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir pada kontrak ini. Selanjutnya PPK dan Penyedia bersepakat dan menyetujui nilai kontrakatau total harga kontrak yang sudah termasuk PPN yang sudah dapat berdasarkan harga satuan dan kuantitas pekerjaan yang tertulis di daftar kuantitas dan harga sebesar Rp. 5.680.000.00,00- (Lima Miliyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Selanjutnya diatur juga mengenai hak kewajiban Para Pihak yaitu PPK dan Penyedia yang meliputi:

a. “PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;

- 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam ontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak
- 3) Melapor pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tangga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan kea tau dari lapangan, segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan dalam pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontak;

- 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia”.

Dalam kontrak awal pekerjaan waktu pelaksanaan 40 hari dari tanggal 13 November 2018 sampai dengan 22 Desember 2018, kemudian diaddendum menjadi 49 kalender dan kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2017. Tetapi pada tanggal 31 desember 2017 pihak penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan progress fisik pengerjaan kontruksi hanya 68%. Kemudian Penyedia memohon kepada PPK untuk diberikan waktu untuk penyelesaian pekerjaan. Tetapi dalam hal ini akan menjadi masalah ketika PPK dalam menentukan waktu pemberian kesempatan kepada pihak penyedia karena berhubungan dengan berakhirnya tahun anggaran. Dalam Pasal 93, Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pemberian kesempatan adalah 50 (lima puluh) dengan hanya pemberian 1 (satu) kali kesempatan perpanjangan kesempatan penyelesaian pekerjaan sedangkan pada PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 adalah maksimal 90 (Sembilan Puluh) hari pemberian kesempatan pelaksanaan pekerjaan dengan 2 (dua) kali kesempatan. PPK memutuskan dengan memberi kesempatan kepada pihak penyedia 50 hari. Pemberian kesempatan 50 hari kalender dihitung dari tanggal 1 januari 2018 sampai dengan 19 februari 2018.

Sampai dengan tanggal 19 februari 2018 pekerjaan belum selesai, kemudian Penyedia meminta lagi lagi perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya selama 40 hari kalender. PPK memberi lagi kesempatan kepada kontraktor atau pihak penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan pertimbangan agar

proyek bangunan tidak mangkrak dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan adanya pemberian kesempatan yang kedua kepada Penyedia dengan pertimbangan data-data dilapangan yang diberikan oleh penyedia dan keyakinan PPK bahwa Penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan maka PPK menggunakan aturan dalam PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 yakni 90 hari pemberian kesempatan yang pertama diaddendum pertama dengan 50 hari kalender dan addendum kedua adalah 40 hari kalender dengan jumlah total 90 hari pemberian kesempatan.

Setelah penjabaran kedudukan kasus diatas, adanya perbedaan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan antara Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah 50 (lima puluh) dan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 90 (Sembilan Puluh) hari. Dengan adanya berbenturan norma aturan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan ini maka perlu dibahas lebih mendalam mengenai hal tersebut.

1. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka

a. Pelelangan Pasar Rakyat Galuh Cempaka

1) Pelelangan I

Berdasarkan surat KPA kepada Tim Panitia Pengadaan Barang Jasa Tugas pembantuan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru Nomor: 510/755/Disdag/2017, tanggal 2 oktober 2017 perihal proses lelang. Dengan dilampiri kerangka acuan kerja (KAK), Harga perkiraan sendiri (HPS), Gambar kerja, Draft syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) dan

RK (Rencana Kerja) dan syarat-syarat dan dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 60 hari kalender.

Pada proses lelang dinyatakan GAGAL oleh pokja dengan surat pokja nomor 03/pokja.TP Perdagangan/X/2017. Tanggal 19 oktober 2017, perihal lelang gagal. Alasan gagal lelang adalah setelah dilakukan evaluasi penawaran, penyedia tidak lulus evaluasi teknis yaitu personil inti tidak memenuhi syarat yang diisyaratkan dalam dokumen lelang.

2) Pelelangan II

Berdasarkan surat KPA kepada Tim Panitia Pengadaan Barang Jasa Tugas pembantuan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru Nomor: 510/755a/Disdag/2017, tanggal 25 oktober 2017 perihal proses lelang. Dengan dilampiri kerangka acuan kerja (KAK), Harga perkiraan sendiri (HPS), Gambar kerja, Draft syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) dan Rencana Kerja dan syarat-syarat dan dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 40 hari kalender.

Pada proses lelang penyedia yang memasukan penawaran hanya ada 1 penyedia.

3) Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka

1) Perubahan DED (Prototipe) diambil langkah-langkah sebagai berikut:

a) Lokasi Proyek

Setelah penandatanganan kontrak pada Senin 13 November 2017 dilakukan penelitian dan pengukuran lokasi oleh konsultan perencanaan, konsultan pengawas dan kontraktor yang dilaporkan

kepada PPK ditemukan kondisi existing lapangan yang berkuntur adanya perbedaan elevasi yang terendah ke elevasi tertinggi 1,35 meter maka perlu adanya perubahan DED maka kontraktor membuat *shop drawing* untuk perubahan DED, membuat CCO terhadap penawaran, menghitung kontruksi, reschedule serta membuat metode pelaksanaan ulang.

b) Kontruksi bangunan

1. *Contract Change Order* 01

Perubahan pada DED kontraktor juga merubah pondasi tiang pancang dengan perhitungan beban kontruksi yang bisa dipertanggungjawabkan dari pun pile diameter 30 cm menjadi mini pile 25 x 25 mm. adapun alasan perubaha yaitu pengiriman material dari distributor (Surabaya) dengan transportasi laut cukup memakan waktu yaitu kurang lebih 1 minggu

Kontraktor merubah dinding penahan tanah urug dari pasangan bata menjadi pasangan batu gunung karena adanya timbunan tanah yang cukup tinggi. Dari perubahan DED tersebut kontraktor melaporkan kepada konsultan pengawas untuk melakukan CCO 01.

2. Addendum 001

Dari hasil kooordinasi dengan KPPN Banjarmasin tanggal 17 Nopember 2017 tentang uang muka 20% KPPN Banjarmasin memberi saran untuk menghilangkan uang muka mengingat waktu pelaksanaan hanya 40 hari kalender, dengan surat

perjanjian KPA Nomor: 510/KPA-01/Disdag/2017 tanggal 17 Nopember 2017 perihal persetujuan Addendum Makan PPK dan kotraktor Pelaksana melakukan Addendum Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Kontruksi Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka Kota Banjarbaru Nomor 510/001/Add-kontrak/PPK/disdag/2017 pada 20 Nopember 2017 dengan perubahan semula uang muka diberikan 20% dari Nilai Kontrak dirubah menjadi pekerjaan kontruksi ini tidak dapat diberikan uang muka.

2) Curah hujan yang cukup tinggi

Berdasarkan laporan harian kontraktor pelaksana, laporan mingguan kemajuan fisik pekerjaan konsultan pengawas dan dari hasil data curah hujan layan informasi meteorology www.ogimet.com curah hujan cukup tinggi diatas normal, maka diambil langkah-langkah berikut:

a. *Contract Change Order* 02

Pada Sabtu 2 Desember 2017 karena pertimbangan teknis untuk mempercepat pekerjaan dikarenakan kondisi cuaca alam (hasil data curah hujan layan informasi meteorology www.ogimet.com, curah hujan cukup tinggi diatas normal) yang berpengaruh pada waktu pelaksanaan pekerjaan, kontraktor melakukan CCO ke 2 terhadap beberapa pekerjaan yaitu perubahan beberapa item sebagai berikut:

1. Los Pedagang dengan jumlah 198 buah dihilangkan.
2. Dinding bangunan bata diganti dengan hebel (bata ringan) dan dinding layar atas dengan spendek.

3. Keramik lantai 20/20 di ganti dengan keramik 40/40.

Dengan apa tersebut diatas maka terjadiperubahan Nilai Kontrak dari nilai sebesar Rp. 5.680.000.000,00 menjadi Rp. 4.770.301.000,00.

b. Addendum 02

Berdasarkan di bawah ini:

1. Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. PMK Nomor 194/PMK.05/2014 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun;
3. CCO 001 dan CCO 002;
4. Laporan harian kontraktor pelaksana, laporan mingguan kemajuan Fisik pekerjaan konsultan pengawas dan dari hasil data curah hujan layanan informasi meteorologi www.ogimet.com, curah hujan cukup tinggi atau diatas normal.

Maka dengan surat persetujuan dari KPA Nomor 510/KPA-02/Disdag/2017 tanggal 4 Desember 2017 perihal persetujuan addendum kedua. PPK dan Kontraktor Pelaksana Melakukan addendum ke-2 dengan perubahan terhadap nilai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu sebagai berikut:

1. Nilai kontrak semula Rp. 5.680.000.000,00 dirubah menjadi sebesar Rp. 4.770.301.000,00 sisanya Rp. 909.699.000,00 dikembalikan ke kas Negara;
 2. Tanggal berlakunya kontrak semula berlaku sejak 13 Nopember 2017 s.d 22 Desember 2017 diubah menjadi kontrak berlaku sejak 13 Nopember 2017 s.d 31 Desember 2017;
 3. Jadwal pelaksanaan pekerjaan semula penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 40 hari kalender diubah menjadi pekerja harus menyelesaikan pekerjaan selama 49 hari kalender.
- c. Addedndum 03
- Berdasarkan di bawah ini:
1. Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. PMK Nomor 194/PMK.05/2014 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun;
 3. CCO 001, CCO 002, CCO 003;
 4. Laporan harian kontraktor pelaksana, laporan mingguan kemajuan Fisik pekerjaan konsultan pengawas dan dari hasil data curah hujan layanan informasi meteorologi

www.ogimet.com, curah hujan cukup tinggi atau diatas normal.

Maka dengan surat persetujuan dari KPA Nomor 510/KPA-03/Disdag/2018 tanggal 1 Januari 2018 perihal persetujuan addendum ketiga. PPK dan Kontraktor Pelaksana Melakukan addendum ke-3 dengan perubahan terhadap nilai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu:

1. Nilai kontrak atau total harga kontrak sudah termasuk PPN yang diperoleh berdasarkan harga satuan pekerjaan sebagaimana tertulis di Daftar Kuantitas dan harga adalah sebesar RP. 3.243.404.680,00 didanai oleh Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Kota Banjarbaru.
 2. Total harga kontrak atau nilai kontrak sudah dengan PPN yang diperoleh sesuai dengan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sesuai yang tertulis pada Daftar Harga dan Kuantitas sebesar Rp. 1.526.496.320,00 didanai oleh APBD/ABT Tahun anggaran 2018 pada Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru yang akan dibayar setelah anggaran disahkan.
 3. Penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu 40 hari kalender terhitung mulai 20 Februari 2018 s.d 31 Maret 2018
- 3) Kendala-kendala yang terjadi dalam pekerjaan pada masa pelaksanaan:

- a. Terlambatnya urungan tanah karena angkutan pengambilan tanah tidak dapat masuk ke kuari (jalan tanah) hal tersebut sudah dapat diatasi, tetapi menyebabkan keterlambatan pada pengecoran beton lantai dan pemasangan keramik.
- b. Telatnya pengecatan cat dasar kontruksi baja, hal ini menyebabkan keterlambatan pekerjaan struktur baja, struktur beton yang terhubung dengan struktur baja, rangkap kap, pasangan atap, pasangan dinding serta aksesorisnya.
- c. Kurangnya jam kerja dan jam lembur.

B. Pemberian Kesempatan Jangka waktu Penyelesaian Kepada Pihak Penyedia dalam Kontrak Penyedia Barang dan Jasa

Dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, pemberian jangka waktu kesempatan penyelesaian pekerjaan kepada pihak penyedia diberikan apabila pihak penyedia terlambat dalam menyelesaikan kontrak karena kesalahan pihak penyedia. Untuk pemberian kesempatan tersebut kepada pihak penyedia berdasarkan dengan pertimbangan pihak PPK yang telah ditunjang dengan keyakinan bahwa pihak penyedia dapat menyelesaikan kontrak dan berdasarkan data-data yang telah diperoleh oleh PPK selama masa kontrak telah berjalan. Tujuan dari pemberian kesempatan kepada pihak penyedia adalah agar pihak penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

Jangka waktu pemberian kesempatan disini adalah masa pelaksanaan pekerjaan yang dimulai sesuai dengan ketentuan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), samapi serah terima pertama pekerjaan. Itulah yang dijadikan dasar

perhitungan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan serta dasar mengenakan sanksi denda keterlambatan kepada pihak penyedia barang/jasa.

Pemberian kesempatan perpanjangan waktu pelaksanaan yang diberikan oleh PPK berdasarkan penilaian yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) “Pekerjaan tambahan;
- b) Perubahan desain;
- c) Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
- d) Masalah yang timbul diluar Kendal pihak penyedia; dan/atau
- e) Keadaan kahar”.

Pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan kepada pihak penyedia diatur dalam pasal 93 peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa adalah 50 hari sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/Pmk.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran adalah 90 hari hari sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Apabila dilihat lebih teliti maka terdapat perbedaan pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan kepada pihak penyedia dalam dua aturan tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik norma peraturan perundang-undangan yang membuat para pihak sulit dalam hal menentukan waktu pemberian kesempatan penyelesaian kontrak khususnya pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Oleh karena itu permasalahan konflik ini harus

diselesaikan agar penyelesaian pekerjaan dalam kontrak dapat berjalan baik dan benar.

1. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibuat Sebelum 1 Juli 2018

Pasca keberlakuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diundangkan pada 22 Maret 2018 maka Perpres ini mulai berlaku dan mencabut perpres yang lama. Tetapi berdasarkan pada pasal 89, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang persiapan dan pelaksanaan kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Juli 2018 maka berlaku Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf a.1 dan a.2 mengatur tentang pemutusan kontrak yang dapat dilakukan oleh PPK. Sebelum pihak PPK melakukan pemutusan kontrak sepihak maka harus memperhatikan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang ada dalam pasal 93 ayat (1) huruf a.1 dan a.2 yang menyatakan bahwa:

“PPK dapat memutus kontrak secara sepihak apabila:

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak:
 - a.1. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari

- kalender sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;”

Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan memiliki akibat yang berbeda dalam huruf a.1 dan a.2, hal ini dapat diterjemahkan secara bertahap yang memiliki hubungan antara satu dengan lainnya sebagai berikut:

- a. Dalam huruf a.1 pemberian kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan maksimal 50 hari tidak akan diberikan oleh pihak PPK kepada pihak Penyedia Barang/Jasa berdasarkan penilaian progres pekerjaan Penyedia Barang/Jasa dan keyakinan PPK yang dianggap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.
- b. Dalam huruf a.2 pemberian kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan oleh pihak PPK dengan mengacu pada penilaian progres pekerjaan dan keyakinan PPK yang menganggap pihak Penyedia Barang/jasa mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan batas waktu maksimal 50 hari tetapi apabila pihak penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.

Dari interpretasi atau penerjemahan pasal diatas yang dilakukan secara bertahap dan memiliki hubungan antara satu dengan lainnya mempunyai maksud pihak PPK memiliki toleransi dalam hal memberikan kesempatan kepada pihak penyedia untuk menyelesaikan kontrak secara baik dan benar. Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan tidak serta merta diberikan kepada pihak penyedia. Pihak PPK akan meneliti progress pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa. Pemberian kesempatan juga

harus didasari oleh keyakinan pihak PPK yang didasari oleh data-data progress pekerjaan. Data-data tersebut diusulkan atau diserahkan oleh pihak penyedia kepada pihak PPK untuk memperpanjang masa penyelesaian pekerjaan serta spesifikasi-spesifikasi yang telah ditentukan disepakati dalam kontrak. Apabila data-data tersebut mendukung keyakinan PPK maka PPK akan memberikan kesempatan dalam penyelesaian pekerjaan pihak penyedia barang/jasa dengan jangka waktu maksimal 50 hari dan hanya diberikan satu kali kesempatan. Apabila pihak Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya maka pihak PPK dapat melakukan pemutusan secara sepihak. Selanjutnya pihak PPK akan melakukan lelang umum maupun pengadaan/pemilihan/penunjukan untuk mencari pihak Penyedia Barang/Jasa yang baru yang mampu dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan kepada pihak penyedia yang diatur dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak hanya mengatur pemberian kesempatan yang tidak melampaui tahun anggaran tetapi juga mengatur pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran. Hal ini diatur dalam pasal 93 ayat (1a) yang menyatakan bahwa:

“Pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a.1 dan huruf a.2, dapat melampaui tahun anggaran”.

Pemberian kesempatan yang melampaui tahun anggaran dalam hal ini hanya diberikan satu kali kesempatan dengan jangka waktu maksimal 50

(lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan. yang menjadi permasalahan disini ketika pelaksanaan pekerjaan itu melampaui tahun anggaran karena sistem anggaran saat ini menggunakan Kontrak Tahun Tunggal yang diharuskan menyelesaikan pekerjaan pada tahun anggaran berjalan. Banyaknya permasalahan yang keluar pada akhir tahun maka keluarlah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/Pmk.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.

PMK ini keluar karena banyaknya permasalahan anggaran akhir tahun yang tidak ada habisnya dan menjadi solusi penyelesaian permasalahan yang dihadapi akhir tahun . Sebelum membahas pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang diatur dalam PMK Nomor: 243.Pmk.05/2015 terdapat perbedaan dengan PMK Nomor 194/Pmk.05/2014, perbedaan ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2
Tabel Perbandingan PMK 194/2014 dan PMK 243/2015

No.	Pasal	PMK 194/2014	PMK 243/2015
1.	Pasal 4,	1) “Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut”: a. “berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan	1) “Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut”: a. “berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa

		<p>keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan”;</p> <p>b. “penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai”;</p> <p>c. “berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran Berikutnya melalui revisi anggaran;”</p> <p>2) “Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat”:</p> <p>a. “pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan”;</p> <p>b. “waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan</p>	<p>akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan”;</p> <p>b. “penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai”;</p> <p>c. “berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran Berikutnya melalui revisi anggaran”.</p> <p>2) “Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat”:</p>
--	--	--	---

		<p>sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan”;</p> <p>c. “pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan”</p> <p>d. “pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran”.</p> <p>3) “Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA memutuskan untuk”:</p> <p>a. “melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya”; atau</p> <p>b. “tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya”.</p> <p>4) “Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)”.</p>	<p>a. “pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan”;</p> <p>b. “waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan”;</p> <p>c. “pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan”; dan”</p> <p>d. “pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran”.</p> <p>3) “Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA memutuskan untuk”:</p> <p>a. “melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya”; atau</p>
--	--	--	---

			<p>b. “tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya”.</p> <p>4) “Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)”.</p>
2.	Pasal 9	<p>1) “Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan”.</p> <p>2) “Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan”:</p> <p>a. “mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran Berikutnya”;</p> <p>b. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan”.</p> <p>3) “Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan</p>	<p>1) “Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan”.</p> <p>2) “Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan”:</p> <p>a. “mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran Berikutnya”;</p> <p>b. tidak boleh menambah jangka waktu/masa</p>

		<p>sebelum jangka waktu Kontrak berakhir”.</p> <p>4) “Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak”.</p>	<p>pelaksanaan pekerjaan”.</p> <p>3) “Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir”.</p> <p>4) “Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK, sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak”.</p> <p>5) “Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/ 1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai Kontrak”.</p>
--	--	--	---

Sumber: Berdasarkan Sumber Data Primer

Ada beberapa perbedaan pada tabel diatas, perbedaan dalam PMK 194/2014 dengan PMK 243/2015 yaitu:

1. Pada pasal 4 ayat (1), waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan berubah menjadi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 90 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.
2. Pasal 9 ayat (4), “Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan”. Perubahan Kontrak berubah menjadi Penyedia barang/jasa memperpanjang masa beraku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK, sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak.
3. Adanya tambahan pada Pasal 9 ayat (5) PMK 243/2015 adalah menyatakan bahwa Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/ 1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai Kontrak.

Sebelumnya pada Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan 50 hari. Selanjutnya PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila berdasarkan penelitian PPK, setelah diberikan 50 hari kesempatan penyelesaian pekerjaan tetap tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya.

Dalam PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwa:

- “a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
- b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai;”

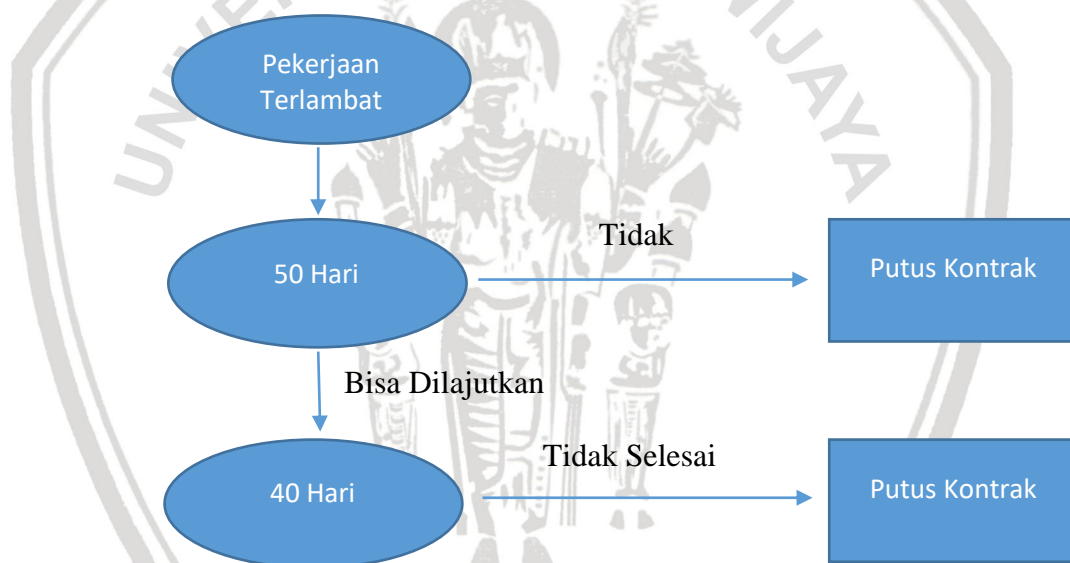
Dapat diinterpretasikan atau diterjemahkan sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1) huruf a, pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan adalah maksimal 90 hari berdasarkan penelitian PPK dengan data-data progress pekerjaan yang telah diserahkan oleh Penyedia dengan didasari oleh keyakinan PPK penyedia dapat menyelesaikan seluruh pekerjaannya.

2. Pasal 4 ayat (1) huruf b, Penyedia yang sanggup menyelesaikan sisa pekerjaannya dalam pemberian waktu kesempatan maksimal 90 hari dan menyatakan kesanggupannya dalam kertas bermaterai, dalam hal ini adalah kontrak addendum.

Perlunya dilihat pemberian kesempatan dalam PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 ini tidak mutlak pemberian 90 hari, dengan maksimal pemberian 2 (dua kali) pemberian kesempatan, ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4
Skema Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan



Sumber: <https://www.pengadaan.web.id/2016/10/inilah-tata-cara-atasi-pekerjaan-yang-tidak-terselesaikan-sampai-akhir-tahun-anggaran.html>

Pemberian kesempatan penyelesaian merupakan hak PPK sehingga PPK berwenang untuk memberikannya atau tidak kepada Penyedia. Hal ini berdasarkan berbagai pertimbangan administratif dan teknis. Disini PPK

harus meneliti dan menghitung berapa hari kesempatan yang harus diberikan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya.

- a. Dalam huruf a.1 pemberian kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan maksimal 50 hari tidak akan diberikan oleh pihak PPK kepada pihak Penyedia Barang/Jasa berdasarkan penilaian progres pekerjaan Penyedia Barang/Jasa dan keyakinan PPK yang dianggap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.
- b. Dalam huruf a.2 pemberian kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan oleh pihak PPK dengan mengacu pada penilaian progress pekerjaan dan keyakinan PPK yang menganggap pihak Penyedia Barang/jasa mapu menyelesaikan pekerjaannya dengan batas waktu maksimal 50 hari tetapi apabila pihak penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.

Sebelum memberikan kesempatan 90 hari kalender ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pemberian kesempatan 90 hari kalender sebagai berikut:

- a. Tidak boleh direncanakan sebelum penandatanganan kontrak.
- b. Berdasarkan penelitian PPK, lebih efisien dan bermanfaat apabila penyedia barang/jasa diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaannya dengan kata lain akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.
- c. Memperpanjang jaminan pelaksanaan.

- d. Penyedia barang/jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani diatas materai oleh pimpinan penyedia barang/jasa.

Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud, menurut PMK Nomor 243/PMK.05/2015 paling sedikit memuat:

- a. Pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
- b. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksana pekerjaan;
- c. Pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
- d. Pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut bunga/denda apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.

Adanya perbedaan aturan mengenai pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 mengakibatkan konflik aturan dalam pemberian jangka waktu penyelesaian. Untuk menyelesaikan konflik aturan tersebut

menggunakan asas *lex Superiori Derogat Legi Inferiori* Asas ini memiliki arti peraturan perundang-undangan yang lebih tingkatnya berlakunya peraturan perundang-undangan lebih rendah tingkatannya apabila peraturan perundang-undangan memuat ketentuan yang saling bertentangan atau berbeda. Untuk menggunakan asas ini harus adanya peringkat aturan. Apabila terjadinya pertentangan maka peraturan yang diatas dapat mengesampingkan peraturan yang dibawah.

Peringkat aturan atau hierarki Peraturan Perundang-Undangan berlaku di Indonesia diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu:

- “(1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
- a. UUD 1945
 - b. Ketetapan MPR
 - c. UU/Perturan Pemerintah pengganti UU
 - d. Peraturan Pemerintah
 - e. Peraturan Presiden
 - f. Peraturan Daerah Provinsi
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain pasal 7 ayat (1), meliputi peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPS, MA, MK, BPK, KY, BI, komisi, badan, lembaga, atau Menteri yang setingkat dibentuk dengan UU atau pemerintah atas perintah UU, DPR Daerah provinsi, Gubernur, DPR Daerah Kota/Kabupaten, Walikota/Bupati, Kades atau yang setingkat keberadaannya diakui dan memiliki kekuatan hukum

mengikat sepanjang itu diperintahkan peraturan perundang-undangan lebih tinggi atau dibuat atas berdasarkan kewenangan.

Dari ketentuan diatas agar peraturan dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;atau
- b. Dibentuk atas kewenangan.

Dalam dokrin ada dua macam peraturan perundang-undangan yang dilihat berdasarkan kewenangan pembentukannya. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar:

- a. Atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut **A. Hamid S. Attamimmi** menegaskan bahwa atribusi kewenangan perundang-undangan diartikan penciptaan wewenang (baru) oleh konstitusi (*grond wet*) atau oleh pembentukan undang-undang (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu negara baik yang sudah maupun yang dibentuk baru untuk itu.⁶²
- b. Delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut **A. Hamid S. Attamimmi** delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pemindahan/penyerahan kewenangan asal yang memberdelegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*) dengan tanggungjawab pelaksanaan kewenangan

⁶² A. Hamid S. Attamimi, **Peranan keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan dalam kurun waktu Pelita I – Pelita IV**, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1990, hlm. 352.

tersebut pada delegataris sendiri, sedangkan tanggungjawab delegans terbatas sekali.⁶³

Selanjutnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kewenangan dalam hal ini bukan kewenangan membentuk peraturan melainkan kewenangan pada ranah lain seperti menteri melakukan kewenangan berdasarkan urusan pemerintahan tertentu yang berasal dari kuasa presiden. “Apabila menteri membentuk peraturan menteri tanpa adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi peraturan menteri tersebut tetap dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan’.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menurut **Bagir Manan dan Kuntana Magnar** peraturan menteri yang dibentuk tanpa adanya delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dikenal sebagai peraturan kebijakan.⁶⁴ Maksudnya suatu keputusan administrasi Negara yang bersifat mengatur secara tidak langsung, mengikat umum namun bukan peraturan perundang-undangan. Karena bukan peraturan perundang-undangan maka tidak dapat diuji oleh Mahkamah Agung.

Kedudukan peraturan menteri yang telah dibentuk sebelum berlakunya Undang-undangan nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan

⁶³ *Ibid*, hlm. 347

⁶⁴ Bagir Manan dan Kontana Magnar, **Beberapa Masalah Hukum Tata Negara**, Alumni, Bandung, 1997 hlm. 169

perundang-undangan tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dibatalkan. Kedudukan peraturan menteri yang dibentuk Undang-undangan nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan baik yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun atas dasar kewenangan dibidang urusan pemerintahan tertentu dapat dikualifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan. Peraturan menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat umum dan dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung.

Kedudukan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat umum dan dapat diuji oleh Mahkamah Agung sebagaimana dijelaskan diatas berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal pembentukan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 dibentuk atas dasar kewenangan Menteri Keuangan. Sebagaimana dalam pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 mengenai pemberian jangka waktu penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa yang tidak melampaui tahun anggaran maupun yang melampaui tahun anggaran tidak ada kata “..... diatur Peraturan Menteri”. PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 merupakan peraturan perundang-undangan yang bukan dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melainkan atas dasar kewenangan Menteri Keuangan itu sendiri sebagaimana telah diatur dalam

perturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 dibuat atas dasar kewenangan menteri tetapi tetap berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Karena ini menyangkut pengaturan mengenai pemberian jangka waktu penyelesaian kepada pihak penyedia dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Jika dilihat dibagian “Mengingat: “ maka Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hierarkinya lebih tinggi atau kedudukannya lebih tinggi dari PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran. Dalam dua aturan diatas yang mengatur mengenai jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan terdapat perbedaan yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah 50 hari dan dalam PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 adalah 90 hari. Hal ini menyebabkan konflik peraturan perundang-undangan karena terdapat perbedaan yang akan membuat bingung para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Untuk itu dalam menyelesaikan konflik tersebut maka digunakanlah asas *Lex Superiori derogate legi inferiori* yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya apabila peraturan perundang-undangan

memuat ketentuan yang saling bertentangan atau berbeda. Maka Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dapat mengesampingkan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015. Maka dalam pemberian jangka waktu penyelesaian pekerjaan kepada pihak penyedia digunakan 50 hari kalender yang dapat melampaui tahun anggaran.

2. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibuat Setelah 1 Juli 2018

Pasca keberlakuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diundangkan pada 22 Maret 2018 maka Perpres ini mulai berlaku dan mencabut Prespres yang lama. Tetapi berdasarkan pada pasal 89, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pengadaan barang/jasa yang persiapan dan pelaksanaan dan kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Juli 2018 maka berlaku Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetap berlaku hingga berakhirnya kontrak. Setelah tanggal 1 Juli 2018 maka kontrak yang buat dan ditandatangani setelah tanggal 1 Juli 2018 maka secara keseluruhan berlaku Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 56 sebagai berikut yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut mengenai jangka waktu pemberian kesempatan kepada pihak penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaannya diatur dalam pasal 91 ayat (2) dan (3) yang dananya bersumber dari APBN atau APBD ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Dengan berlakunya peraturan yang baru mengenai “pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 22 Maret 2018. Dengan adanya aturan baru ini maka Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi dicabut dan tidak berlaku lagi. Hal ini dapat dilihat pada pasal 92 dan 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan maka dalam pasal tersebut menyatakan:

“ Pasal 92 : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93 : Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.”

Jika dilihat pada pasal tersebut secara tegas telah menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mengenai aturan dalam pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga mengatur lebih singkat dan jelas hal ini tercantum dalam pasal 91 ayat (2) dan dan (3) mengenai ketentuan penutup dijelaskan bahwa sebagaimana Kontrak Pengadaan arang/Jasa Pemerintah yang dananya bersumber dari APBN atau APBD ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Sedangkan dalam pemberian jangka waktu penyelesaian pekerjaan dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditegaskan dalam pasal Pasal 93 ayat (1) huruf a.1. dan a.2. yang dalam pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan diberikan satu kali kesempatan dengan jangka waktu maksimal 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan. Begitu juga dalam pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan yang melampaui tahun anggaran hal ini ditegaskan dalam pasal 93 ayat (1a) yaitu hanya diberikan satu kali kesempatan dengan jangka waktu maksimal 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan. Maka dengan perbedaan ini dapat dilihat jika ada perbedaan dalam hal ketentuan pemberian jangka waktu kesempatan penyelesaian pekerjaan yang dapat menimbulkan konflik.

Jika dilihat lebih teliti mengenai berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 89 ayat (1) dan (2) dan pasal 94 terdapat perbedaan berlakunya perpres ini. Dalam Pasal 89 menyatakan bahwa:

“ Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak”.

Selanjutnya dalam pasal 94 menyatakan bahwa:

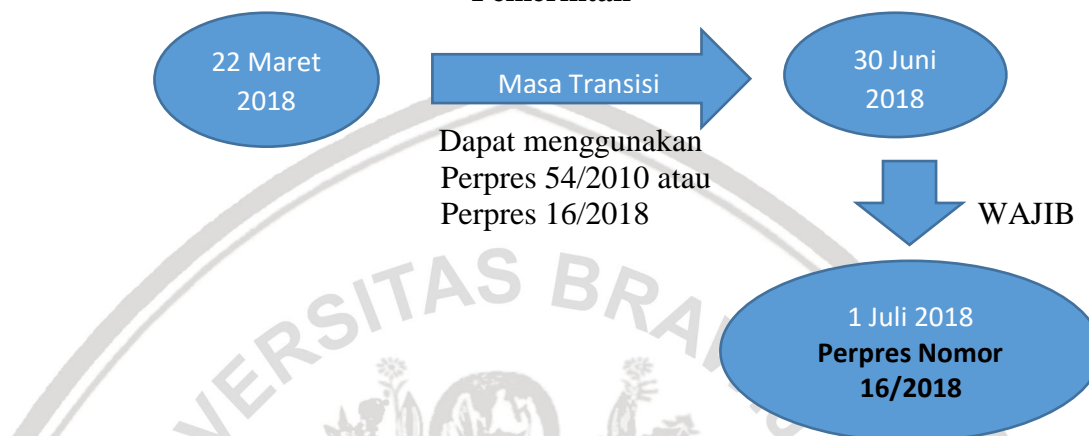
“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.

Jika dilihat dibagian akhir pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2018. Dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka seluruh ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tetapi didalam pasal 89 merupakan masa transisi pemberlakuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah tetap dapat menggunakan Perpres yang terdahulu. Kontrak yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetap mengacu Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hingga pada tanggal 30 Juni 2018. Setelah tanggal 1 Juli 2018 Kementerian/ Lembaga/ Perangkat

Daerah wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jika diilustrasikan gambar sebagai berikut:

Gambar 5
Masa Berlakunya Perpres dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Sumber: Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Untuk menyelesaikan konflik aturan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* ini berlaku yaitu peraturan perundang-undangan yang baru dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Asas ini hanya berlaku untuk antar undang-undang yang sederajat. Asas ini diterapkan apabila peraturan perundang-undangan yang baru tidak tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang lama. Biasanya pada peraturan perundang-undangan yang baru ada pernyataan yang tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang lama. Maka Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat

Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat mengesampingkan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam hal menentukan pemberian jangka waktu penyelesaian pekerjaan dalam kontrak pengadaan barang/jasa maka digunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 92 ayat (2) atau (3) tergantung pada sumber dananya yaitu 90 hari terhitung sejak Peraturan ini diundangkan.

3. Analisis Kontrak Pembangunan Pasar Galuh Cempaka dalam Pemberian Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kontrak kontruksi pembangunan pasar galuh cempaka di Banjarbaru Kalimantan Selatan merupakan salah satu Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena sumber dananya berasal dari dana APBN sesuai dengan yang tercantum dalam SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak). Kontrak ini juga disebut pekerjaan kontruksi sebagaimana telah tercantum dalam surat perjanjian Nomor: 510/001/Kontrak/PPK/Disdag/2017. Kontrak ini dilakukan oleh pihak PPK dan Penyedia barang/jasa dilaksanakan mulai pekerjaan pada tanggal 13 November 2017, waktu penyelesaian pekerjaan adalah selama 40 hari kalender dan harus selesai pada 22 Desember 2017.

Jenis kontrak ini diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak (SKK) sebagai berikut:

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Kontrak harga satuan.

2. Kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran: Kontrak tahun tunggal.
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: kontrak pengadaan tunggal.
4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: kontrak pengadaan pekerjaan tunggal.

Dalam masa melakukan pekerjaan pihak penyedia barang/jasa mengalami berbagai kendala yang membuat pihak penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. kendala-kendala yang dialami oleh pihak penyedia barang/jasa yaitu adanya perubahan pada DED Prototipe (*Detail Engeneering Design*) dan cuaca yang tidak dapat diprediksi yaitu curah hujan yang cukup tinggi.

Setelah adanya penandatanganan kontrak maka dilakukanlah penelitian dan pengukuran lokasi pekerjaan oleh konsultan perencana, konsultan pengawas dan kontraktor. Dilaporkan kepada PPK ditemukan kondisi existing lapangan yang berkuntur adanya elevansi yang cukup tinggi. Perubahan Dengan kondisi tersebut maka diperlukannya adanya perubahan DED maka kontraktor membuat *shop drawing* untuk perubahan DED, membuat CCO (*Contract Change Order*) terhadap penawaran yang mengakibatkan adanya perubahan pada perhitungan recana anggaran pelaksanaan ulang, menghitung kontruksi, resechedule serta membuat metode pelaksanaan ulang. Dalam pelaksanaan pekerjaan juga penyedia mengalami kendala curah cuaca hujan yang cukup tinggi yang membuat pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai pada waktu

yang telah disepakati. Sehingga dengan adanya perubahan tersebut membuat Penyedia kehilangan waktu untuk melaksanakan pekerjaannya sedangkan kendala yang dialami oleh pihak penyedia sudah diluar kuasanya.

Dengan adanya kendala yang dialami oleh Penyedia maka pihak penyedia mengajukan penambahan waktu pengerjaan dengan berdasarkan data-data yang ada atau buku harian dilapangan. Pihak PPK akan memeriksa dan mempertimbangkan memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan atau tidak.

PPK akan membandingkan kondisi fisik dengan buku harian dilapangan apakah sesuai dengan laporan atau hanya catatan fiktif. Selanjutnya akan dilakukan uji petik dengan cara membandingkan anatara catatan/daftar alat berat dengan fisiknya. PPK juga akan memeriksa kondisi fisik alat berat masih layak operasi atau tidak.

PPK juga akan memeriksa laporan harian tersebut telah disahkan/legalisir wakil PPK. Foto-foto atau dokumentasi akan diperiksa apakah telah dibuat foto dokumentasi atas pelaksanaan pekerjaan dan yang membuat foto dokumen PPK atau Penyedia.

Setelah memeriksa semua dokumen maka PPK akan menentukan apakah diberikan kerja tambah atau tidak. Jika diberikan maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pekerjaan/volume bertambah.
2. Perubahan desain.
3. Keterlambatan disebabkan oleh pihak PPK.
4. Masalah yang timbul diluar kemampuan Penyedia.

5. Karena terjadi *force majuer* “addendum kontrak”.

Adapun tata cara penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun anggaran yang kemudian dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya adalah sebagai berikut :⁶⁵

1. Dilakukan addendum Kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
2. Berdasarkan penelitian PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
3. Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani diatas materai oleh Pimpinan Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud, menurut PMK paling sedikit memuat:⁶⁶

⁶⁵ Pengadaan, **Inilah Tata Cara Atasi Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran** (online), <https://www.pengadaan.web.id/2016/10/inilah-tata-cara-atasi-pekerjaan-yang-tidak-terselesaikan-sampai-akhir-tahun-anggaran.html>, (2016), (13 September 2018).

⁶⁶ *Ibid.*

- a) Pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - b) Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - c) Pernyataan bawah penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
 - d) Pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.
4. Berdasarkan penelitian KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun anggaran berikutnya melalui revisi anggaran.
 5. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan.

Dalam kontrak ini keterlambatan disebabkan oleh masalah yang timbul diluar kemampuan pihak penyedia serta pekerjaan yang melampaui tahun anggaran. Karena itu atas pertimbangan data-data dan dokumen yang telah diberikan pihak penyedia dan berdasarkan asas efesiensi dan efektivitas yang tertuang dalam pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PPK memberikan kesempatan kepada pihak Penyedia.

Pertimbangan lainnya yang digunakan oleh PPK untuk memberikan kesempatan jangka waktu penyelesaian adalah prinsip efesiensi dan efektifitas. Prinsip efesiensi dimaksud adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan prinsip efektifitas artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai manfaat setinggi-tingginya.

Manfaat tersebut berupa:

- a. Kualitas terbaik;
- b. Penyerahan tepat waktu;
- c. Kuantitas terpenuhi;
- d. Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan
- e. Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.

Berdasarkan perjanjian Nomor: 510/001/Kontrak/PPK/Disdag/2017 tanggal dibuatnya kontrak kontruksi ini yaitu tanggal 13 November 2017

maka menggunakan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Karena banyak timbul masalah dalam pekerjaan yang melampaui tahun anggaran maka menggunakan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015. PPK memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan maksimal 90 hari kalender berdasarkan prinsip efektifitas dan efesiensi agar pihak Penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan secara menyeluruh berkualitas dan bangunan tersebut dapat meberikan manfaat sebesar-besarnya kepada para masyarakat dan pedagang Pasar Rakyat Galuh Cempaka.

C. Akibat Hukum Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan

1. Akibat Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebelum 1 Juli 2018

Pasca berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diundangkan pada 22 Maret 2018 maka Perpres ini mulai berlaku dan mencabut perpres yang lama. Tetapi berdasarkan pada pasal 89, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pengadaan barang/jasa yang persiapan dan pelaksanaan dan kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Juli 2018 maka berlaku Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetap berlaku hingga berakhirnya kontrak. Adanya pemberian jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh keterlambatan

penyelesaian oleh pihak penyedia maka menimbulkan akibat hukum yang hanya pada pihak penyedia

Apabila pihak penyedia barang/jasa tidak bisa menyelesaikan kontraknya maka dapat dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK. Dalam lampiran Ketiga Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pemutusan kontrak dapat dilakukan apabila:⁶⁷

- a) Denda keterlambatan pelaksanaan perjanjian akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;
- b) Penyedia lalai atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh Intansi yang berwenang; dan/atau
- d) Pengaduan tentang penyimpangan prosuder, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan dinyatakan benar oleh intansi yang berwenang.

Syarat-syarat pemutusan kontrak di atas bersifat alternatif atau kumulatif. Hal ini dapat dilihat dalam kata “dan/atau”. Oleh karena itu syarat-syarat yang telah dikemukakan di atas dapat dipenuhi salah satunya atau seluruhnya sebagai bahan pertimbangan pihak PPK dalam hal memutuskan kontrak pengadaan barang/jasa .

⁶⁷ Hernold Ferry Makawimbang, *Op. Cit*, hlm. 568

Syarat-syarat pemutusan kontrak mempunyai akibat hukum bagi pihak penyedia barang/jasa. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:⁶⁸

- a) Jaminan pelaksanaan dicairkan;
- b) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan;
- c) Penyedia membayar denda; dan/atau
- d) Penyedia dimasukkan kedalam daftar hitam

Berdasarkan pasal 93, Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pihak penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dan sudah diberikan penambahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan pasal 120, Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa:

“Selain perbuatan dimaksud dalam pasal 118 ayat (1) Penyedia Barang/jasa yang terlambat menyelesaikan Pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan”.

Jika didalam Perpres waktu maksimal pemberian jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 50 hari kalender maka denda yang dikenakan adalah 50/1000 dari nilai kontrak atau nilai bagian dari kontrak. 50 hari

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 569

kalender ini dapat melampaui tahun anggaran. Sanksi denda ini dibuat di dalam surat kesanggupan penyedia dapat menyelesaikan pekerjaannya dihadapan PPK dan denda akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai.

Berbeda jika kita lihat sanksi denda yang dikenakan dalam PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran Pasal 9 ayat (4) dan (5) yang menyatakan bahwa:

- (4) “Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK, sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak”.
- (5) “Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/ 1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai Kontrak.”

Denda yang dikenakan pada PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan jumlah maksimal hari kalender penambahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Jumlah hari kalender maksimal yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 90 hari kalender. Jadi jika penambahan waktu penyelesaian pekerjaan adalah maksimal 90 hari kalender, maka denda yang dikenakan adalah 90/1000 dari nilai kontrak atau nilai dari bagian kontrak. Tetapi dalam hal ini untuk pemberian jangka waktu penyelesaian dalam PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan tidak serta merta

langsung diberikan 90 hari tapi secara bertahap yaitu tahap pertama 50 hari kalender maksimal dan tahap kedua 40 hari kalender maksimal.

Pemberian jangka waktu ini hanya berlaku untuk kontrak yang menggunakan anggaran APBN atau APBD yang pekerjaannya tidak dapat terselesaikan samapi dengan tahun anggaran. Pihak Penyedia Barang/Jasa tidak hanya dikenakan sanksi denda, Penyedia Barang/Jasa juga harus memperpanjang jaminan pelaksanaan pekerjaan dan menandatangani surat kesanggupan penyelesaian pekerjaan. Sanksi denda yang dikenakan kepada pihak Penyedia sudah termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Akibat Hukum Kontrak Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah Yang Dibuat Sesudah 1 Juli 2018

Pasca berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diundangkan pada 22 Maret 2018 maka Perpres ini mulai berlaku dan mencabut perpres yang lama. Tetapi berdasarkan pada pasal 89, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pengadaan barang/jasa yang persiapan dan pelaksanaan dan kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Juli 2018 maka berlaku Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetap berlaku hingga berakhirnya kontrak. Kontrak yang ditandatangani dan dibuat setelah 30 Juni 2018 maka ketentuan kontrak pengadaan barang/jasa belaku Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

Jika dilihat dalam perpres baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pasal 56, mengenai penyelesaian kontrak menyatakan:

- 1) “Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.”
- 2) “Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.”
- 3) “Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.”

Selanjutnya mengenai jangka waktu pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan diatur dalam pasal 91 ayat (2) s.d (5) yaitu maksimal 90 hari kalender dan harus dimuat dalam addendum kontrak. Mengenai sanksi atau akibat hukum dari pemberian jangka waktu penyelesaian pekerjaan kepada Penyedia Barang/Jasa diatur dalam pasal 78 ayat (3) perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- a. Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melakukan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
- c. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d. Melakukan kesalahan perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan pada hasil audit;

- e. “Menyerahkan barang/jasa yang tidak sesuai kualitasnya dengan kontrak berdasarkan audit”; atau
- f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Selanjutnya sanksi yang dikenakan atas tindakan atau perbuatan diatas bersifat optional yang diatur dalam pasal 78 ayat (4) yaitu:

- a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
- b. Sanksi pencairan jaminan;
- c. Sanksi daftar hitam;
- d. Sanksi ganti kerugian; da/atau
- e. Sanksi denda.

Pihak Penyedia Brang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dan atas pertimbangan PPK memberikan pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan maka pihak penyedia dikenakan sanksi denda. PPK akan menetapkan dendanya yaitu 1/100 dari nilai kontrak atau nilai dari bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak yang dimaksud tidak termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Terdapat perbedaan akibat hukum dalam Prespres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, PMK Nomor 243/Pmk.05/2015, dan Prespres Nomor 16 Tahun 2018 dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3

Perbedaan Tindakan Atau Perbuatan Yang Dilakukan Pihak Penyedia Beserta Akibat Hukumnya dalam Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PMK Nomor 243/Pmk.05/2015, dan Prespres Nomor 16 Tahun 2018

No.	Nama	Perpres Nomor 54/2010 beserta perubahannya	PMK Nomor 243/Pmk.05/2015	Prespres Nomor 16/2018	Keterangan
1.	Perbuatan/tindakan yang dikenakan sanksi	<p>a) “Denda keterlambatan pelaksanaan perjanjian akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak”;</p> <p>b) “Penyedia lalai atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan”;</p> <p>c) “Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh Intansi yang berwenang; dan/atau”</p> <p>d) “Pengaduan tentang</p>	<p>a) “Denda keterlambatan pelaksanaan perjanjian akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak”;</p> <p>b) “Penyedia lalai atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan”;</p> <p>c) “Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh Intansi yang berwenang; dan/atau”</p> <p>d) “Pengaduan tentang</p>	<p>a) “Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan”;</p> <p>b) “Menyebabkan kegagalan bangunan”;</p> <p>c) “Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan”;</p> <p>d) “Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit”;</p> <p>e) “Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan audit”;</p> <p>f) “Terlambat menyelesaikan</p>	Dalam perpres ada perubahan dan penambahan perbuatan/tindakan yang dikenakan sanksi.

		penyimpangan prosuder, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang”.	penyimpangan prosuder, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang”.	pekerjaan sesuai dengan kontrak”.	
2.	Sanksi yang dikenakan	<p>a) “Jaminan pelaksanaan dicairkan;</p> <p>b) “Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan”;</p> <p>c) “Penyedia membayar denda; dan/atau”</p> <p>d) “Penyedia dimasukkan kedalam daftar hitam”.</p>	<p>a) “Jaminan pelaksanaan dicairkan;</p> <p>b) “Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan”;</p> <p>c) “Penyedia membayar denda; dan/atau”</p> <p>d) “Penyedia dimasukkan kedalam daftar hitam”.</p>	<p>a) “Sanksi digugurkan dalam pemilihan;</p> <p>b) “Sanksi pencairan jaminan”;</p> <p>c) “Sanksi daftar hitam”;</p> <p>d) “Sanksi ganti kerugian; dan/atau”</p> <p>e) “Sanksi denda”.</p>	<p>Dalam pengenaan sanksi kepada pihak Penyedia mengenai jaminan pelaksanaan dicairkan dan sisa uang muka atau jaminan uang muka ditidakan di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di dalam Perpres yang terdapat</p>

					penambahan saksi yaitu sanksi ganti kerugian jika Pihak Penyedia melakukan perbuatan yang merugikan nya sesuai dengan nilai kerugian yang dialami.
3.	Pengenaan PPN	“Sudah termasuk di dalam denda”.	“Sudah termasuk di dalam denda”.	“Tidak termasuk di dalam denda”.	
4.	Denda yang dikenakan	“1/1000 dari nilai bagian kontrak atau nilai kontrak sesuai dengan setiap hari keterlambatan yaitu maksimal 50 hari kalender.”	“Denda lebih dari 5%, dari penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan dengan nilai kontrak atau paling banyak 9% dari nilai kontrak.”	“1/1000 dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Maksimal 90 hari kalender kerja atau maksimal 90/1000 dari nilai kontrak atau nilai bagian dari kontrak”.	“Dalam memperpanjang jaminan pekerjaan dilakukan dua kali yaitu jaminan pelaksanaan yang pertama dan kedua yang dilakukan sebelum penandatanganan perubahan kontrak”.

Sumber : Berdasarkan Sumber Data Primer

3. Analisis Akibat Hukum dalam Kontrak Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka

Kontrak Kontruksi pembangun Pasar Rakyat Galuh Cempaka berdasarkan surat perjanjian nomor 005/001/Kontrak/PPK/Disdag/2017 yang ditandatangani pada 13 November 2017. Kontrak ini tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015. Pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan di sebabkan oleh kesalahan atau keterlambatan dari pihak penyedia. Untuk menyelesaikan pekerjaannya PPK memberikan kesempatan jangka waktu penyelesaian menggunakan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 berdasarkan pertimbangan aspek teknis, prinsip efisiensi dan efektifitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Akibat hukum yang dikenakan kepada pihak penyedia atas keterlambatan pekerjaannya yang disebabkan oleh kesalahan pihak penyedia maka sanksi denda dikenakan sesuai aturan yang digunakan didalam kontrak. Jika kontrak yang dibuat sebelum berlakunya atau masih dalam masa transisi yang menggunakan Prespres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya serta PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 maka untuk sanksi denda yang dikenakan adalah 1/1000 dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak. Untuk pekerjaan yang tidak melampaui tahun anggaran adalah 5% dari nilai kontrak dengan jaminan pelaksana atau maksimal 50 hari kalender dan maksimal 90 hari kalender dengan menambahkan jaminan pelaksanaan atau paling banyak 9% dari nilai kontrak untuk pekerjaan yang melampaui tahun anggaran. Jika kontrak dibuat

pada masa transisi dan pada bulan 1 Juli 2018 maka denda yang dikenakan adalah 1/1000 dari nilai kontrak adalah 90 hari kalender.

Jika dilihat dalam kontrak pembangunan pasar rakyat galuh cempaka Nomor: 510/001/Kontrak/PPK/Disdag/2017 kendala-kendala yang telah dialami oleh penyedia membuat Penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan. Untuk menyelesaikan pekerjaannya Penyedia harus mengajukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada PPK yang berakibat dia dikenakan denda berdasarkan jumlah per-hari keterlambatan yaitu 1/1000. Denda yang dikenakan oleh Penyedia dalam kontrak ini adalah 9% dari nilai kontrak yaitu sebesar $9\% \times \text{Rp. } 1.526.496.320,00 = \text{Rp. } 137.384.668,80$ Dibulatkan Rp. 137.384.700,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan Pembayaran atas penyelesaian sisa anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Ini membuat Penyedia dirugikan dikenakan denda tersebut karena kendala-kendala yang telah dijelaskan sebelumnya sudah diluar kendali atau kuasa Penyedia. Dalam mengatasi kendala tersebut Penyedia mengalami kehilangan waktu yang membuat Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal mengenai konflik pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian pekerja kepada pihak penyedia yaitu:

1. Untuk mengatasi konflik aturan mengenai pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian sebagai berikut:
 - a. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2018, berdasarkan pasal 89, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih berlaku ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran. Untuk menyelesaikan konflik tersebut dapat menggunakan asas *Lex Superiori derogate Legi Inferiori* yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dapat mengesampingkan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015, pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian maksimal 50 hari.

b. Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibuat setelah 1 Juli 2018, maka berlaku secara keseluruhan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk menyelesaikan konflik antara Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat menggunakan asas *Lex Posterior derogate Legi Priori* yaitu Perpres 16 Tahun 2018 mengesampingkan Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian maksimal 90 hari..

2. Akibat Hukum dalam pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah dikenakan denda kepada pihak penyedia. Denda yang dikenakan sebagai berikut:

a. Kontrak pengadaan barang/jasa yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2018 berdasarkan pasal 89, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka akibat hukumnya tunduk pada ketentuan menurut Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015. Jika pemberian jangka waktu penyelesaian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka denda yang dikenakan adalah 1/1000 dari nilai bagian kontrak atau nilai kontrak sesuai dengan setiap hari keterlambatan yaitu maksimal 50 hari kalender. Sedangkan pemberian jangka waktu penyelesaian berdasarkan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 maka denda yang dikenakan denda lebih dari 5%, penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan menjadi 1/1000 dikalikan jumlah hari penyelesaian pekerjaan dikalikan dengan nilai kontrak atau paling banyak 9% dari nilai kontrak.

- b. Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibuat setelah 1 Juli 2018, maka berlaku secara keseluruhan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akibat hukum yang dikenakan adalah denda 1/1000 dari nilai bagian dari kontrak atau nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Maksimal 90 hari kalender kerja atau maksimal 90/1000 dari nilai bagian dari kontrak atau nilai kontrak.

B. Saran

1. Untuk menyelesaikan konflik aturan mengenai pemberian kesempatan jangka waktu pekerjaan kontrak pengadaan barang/jasa yang dibuat sebelum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2018 menggunakan asas *Lex Superiori derogate Legi Inferiori*. Sedangkan Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibuat setelah 1 Juli 2018 menggunakan asas *Lex Posterior derogate Legi Priori*.
2. Didalam Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PMK Nomor 243/Pmk.05/2015, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak pernah ada pasal yang memuat penggantian waktu yang hilang. Di dalam pekerjaan kontruksi biasanya ada waktu-waktu yang hilang dalam pengerjaannya. Kondisi-kondisi tertentu yang menuntut adanya perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan seperti:
 - a. Adanya perubahan DED (*Detail Engenering Detail*) karena kondisi lapangan yang menuntut dilakukannya pembuatan soft drawing sesuai dengan kondisi lapangan yang mengharuskan adanya:
 - 1) Dengan adanya perubahan DED maka dilakukanlah perhitungan kontruksi ulang.
 - 2) Menyusun ulang metode pelaksanaan pekerjaan.
 - 3) Reschedule jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Cuaca yang tidak dapat diprediksi seperti curah hujan yang tinggi.

Akibat denda tersebut maka jika ingin melanjutkan pelaksanaan penambahan waktu pekerjaan Penyedia berkenan dikenakan denda yang denda tersebut merugikan pihak penyedia. Seharusnya didalam Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya dalam kontrak kontrusi harus ada memuat pasal yang mengatur adanya mengatasi waktu yang hilang dalam masa pelaksanaan pekerjaan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Diantha, I Made Pasek, **Metodelogi Penelitian Hukum Normatif**, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016.
- H.S. Salim, **Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak Cetakan II**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- H.S. Salim, **Hukum Kontrak INNOMINAAT di Indonesia Buku Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ibrahim, Johnny, **Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006.
- Ishaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Makawimbang, Hernold Ferry, **Kompilasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, libri, Jakarta, 2016
- Manan, Bagir dan Magnar, Kontana, **Beberapa Masalah Hukum Tata Negara**, Alumni, Bandung, 1997.
- Miru, Ahmadi, **Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Radjagukguk, Erman, **Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik Indonesia**, dalam Peter Mahmud Marzuki, dkk (ed), **Jual Beli Barang secara Internasional**, Proyek ELIPS, Jakarta, 1998.
- Santoso, Lukman AZ, **HUKUM PERIKATAN TEORI HUKUM DAN TEKNIS PEMBUATAN KONTRAK**, Setara Press, Malang, 2016.
- Simanjuntak, P.N.H. **Pokok Hukum Perdata Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Soedharyono Soimin, S.H., **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.

Subekti,R., **Hukum Perjanjian Cetakan Ke-XII**, PT. Intermasa, Jakarta, 1990.

Subekti, R., **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 2003.

Suharnoko, **Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus**, Prenada Media Grup,Jakarta, 2004.

Sutedi, Adrian, **Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Beragai Permasalahannya**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Sutedi, Adrian, **Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

JURNAL

Abdul Karim Munthe, **Penggunaan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam**, Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonedia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/Pmk.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Candra Setyo Perdana Putra, *Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Pengguna Jasa Konstruksi Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Dengan Penyedia Jasa Konstruksi (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/Pn.Kd.Mn)*, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2015.

Haswangga Riskian Cahya Purba, *Perjanjian Kontrak Pengadaan Atau Jasa Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Dengan Swasta (Studi Kasus Pembayaran Ganti Rugi Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk)*, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2014.

Reza Putra Mahardika, *Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Studi Implementasi Azas Kebebasan Berkontrak Di Balai Penelitian Tanaman Tembakau Dan Serat Malang)*, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013.

INTERNET

Bagusprahutdi, **Bentuk Dan Jenis Kontrak Berdasarkan Aspek Pembagian Tugas** (online), <https://sastrasipilindonesia.wordpress.com/2012/02/15/bentuk-dan-jenis-kontrak-berdasarkan-aspek-pembagian-tugas/>, (15 Februari 2012), (17 Desember 2017).

Gakindow, Gakindo, **LPSE berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012** (online), <http://gakindowonogiri.blogspot.co.id/2014/04/lpse-berdasarkan-peraturan-presiden.html?m=0>, (Senin, 07 April 2012), (2017).

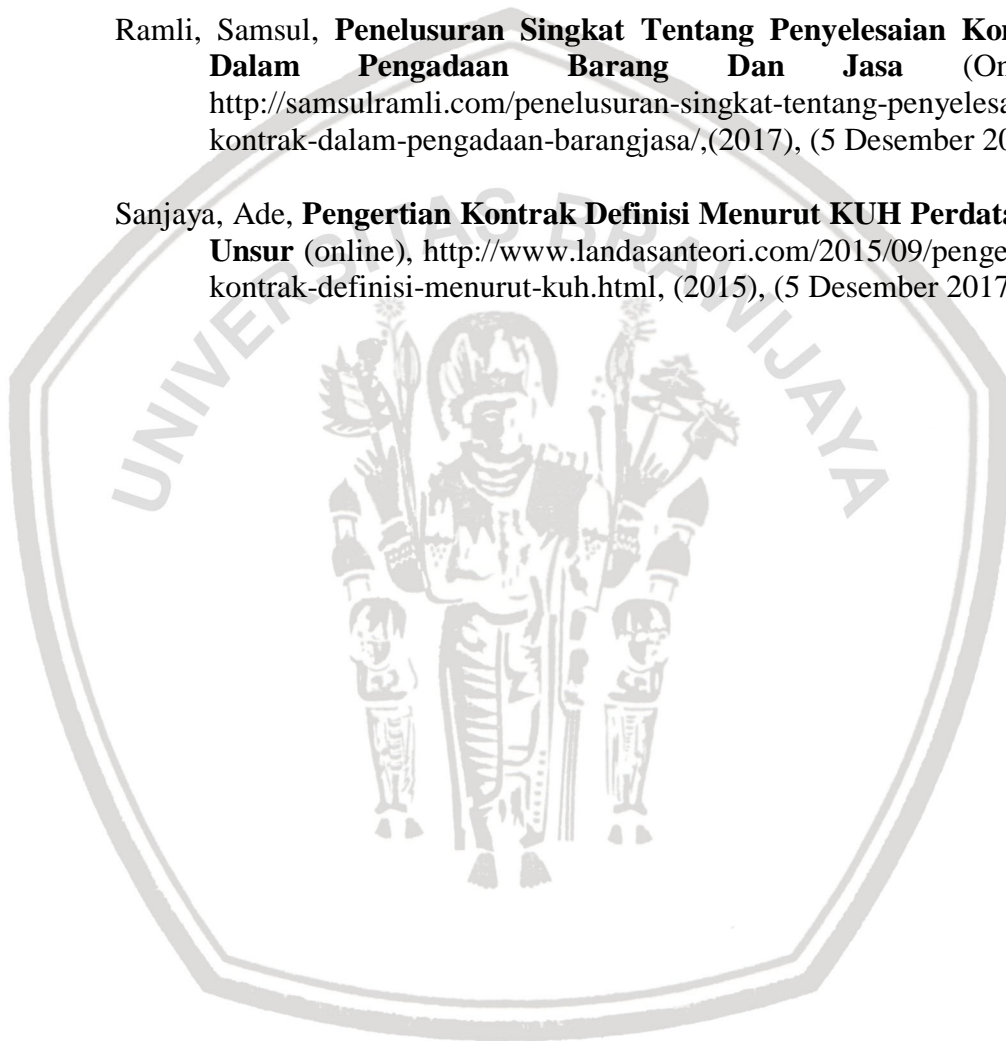
LPSE Kota Jambi, **Matriks Perbedaan Antara Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dengan Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, <http://lpse.jambikota.go.id/eproc/> (Online), 2017.

Manurung, Renhard, , **Bentuk-Bentuk Kontrak Kontruksi** (Online), <https://konstruksiperkerasanjalaraya.blogspot.co.id/2016/03/bentuk-bentuk-kontrak-konstruksi.html>, (Maret 2016), (18 Desember 2017)

Pengadaan, **Inilah Tata Cara Atasi Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran** (online), <https://www.pengadaan.web.id/2016/10/inilah-tata-cara-atasi-pekerjaan-yang-tidak-terselesaikan-sampai-akhir-tahun-anggaran.html>, (2016), (13 September 2018).

Ramli, Samsul, **Penelusuran Singkat Tentang Penyelesaian Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa** (Online), <http://samsulramli.com/penelusuran-singkat-tentang-penyelesaian-kontrak-dalam-pengadaan-barangjasa/>, (2017), (5 Desember 2017).

Sanjaya, Ade, **Pengertian Kontrak Definisi Menurut KUH Perdata dan Unsur** (online), <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-kontrak-definisi-menurut-kuh.html>, (2015), (5 Desember 2017).





LAMPIRAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 336 Tahun 2018

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
 - b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
-
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - 4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 - 5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
 - 6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
 - 7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

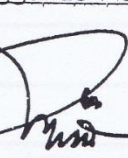
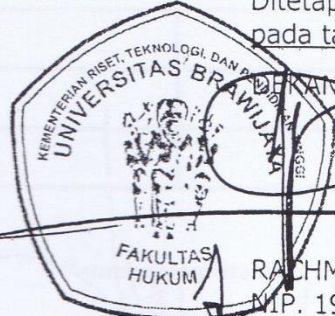
MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

: **Amelia Sri Kusuma Dewi, SH.M.Kn; Shanti Riskawati, SH.M.Kn.**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Puteri Widya Syahna Hiday** NIM **14501010111162**

: Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 13 Maret 2018



RAHMAD SAFA'AT
NIP. 196208051988021001

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI BAGIAN PERDATA

Pembimbing Utama : Ameli Srikusumadewi, S.H,
Mkn
Pembimbing :
Pendamping : Shanti Riskawati, S.H, Mkn
SK Dekan : No. 336 tahun 2018
: Tgl. 13 Maret 2018

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

- Puteri Widya syahna Hikayat
- 4501010111162
- Pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah

[illegible]

Mengetahui
Ketua Bagian

~~Rembimbing Utama~~

Pembimbing Rendamping

Shant' R. E.H. M.K.



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id <http://hukum.ub.ac.id>

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 896/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : PUTERI WIDYA SYAHNA HIDAYAT
NIM : 145010101111162
Judul : PEMBERIAN KESEMPATAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 November 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERDAGANGAN

Jl. Panglima Batur Nomor.08 Telp/Fax. (0511) 4772206 Banjarbaru

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:
Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka Kota Banjarbaru
Nomor :
510/001/Kontrak/PPK/Disdag/2017

“SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di **Banjarbaru** pada hari **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** antara **RACHMAT HIDAYAT, SH**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama **Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru**, yang berkedudukan di **Jl. Panglima Batur Nomor.08 Telp/Fax. (0511) 4772206 Banjarbaru**, berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR 1070/M-DAG/KEP/9/2017** tanggal **5 September 2017** selanjutnya disebut “**PPK**” dan **SYAM S. ABDUL MUIS, Direktur Utama**, yang bertindak untuk dan atas nama **PT Bina Karsyam**, yang berkedudukan di **Jl. Tanjung Tururuka No.48 Kel. Tatura Prov. Sulawesi Tengah**, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar **No. 07** tanggal **05 November 2008**, selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara **pa**ut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 5.680.000.000,00** (Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta rupiah);
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar;
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
**Dinas Perdagangan Kota
Banjarbaru**
PPK



RACHMAT HIDAYAT, SH
NIP. 19700702 200701 1 019

Untuk dan atas nama
PT. Bina Karsyam



SYAM S. ABDUL MUIS
Direktur Utama

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PERDAGANGAN

Jl. Panglima Batur Nomor.08 Telp/Fax. (0511) 4772206 Banjarbaru



ADDENDUM 01

NOMOR : 510/001/Add-Kontrak/PPK/DISDAG/2017,
TANGGAL 20 November 2017

ATAS

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN
NOMOR : 510/001/Kontrak/PPK/DISDAG/2017
TANGGAL : 13 Nopember 2017

PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT GALUH CEMPAKA
KOTA BANJARBARU

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

DENGAN

PT. BINA KARSYAM

Jl. Tanjung Tururuka No.48 Kel. Tatura Prov. Sulawesi Tengah



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERDAGANGAN

Jl. Panglima Batur Nomor.08 Telp/Fax. (0511) 4772206 Banjarbaru

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:
Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka Kota Banjarbaru
Nomor :

510/001/Add-Kontrak/PPK/Disdag/2017

“ADDENDUM SURAT PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani di **Banjarbaru** pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** antara **RACHMAT HIDAYAT, SH**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama **Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru**, yang berkedudukan di **Jl. Panglima Batur Nomor.08 Telp/Fax. (0511) 4772206 Banjarbaru**, berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR 1070/M-DAG/KEP/9/2017** tanggal **5 September 2017** selanjutnya disebut “**PPK**” dan **SYAM S. ABDUL MUIS, Direktur Utama**, yang bertindak untuk dan atas nama **PT Bina Karsyam**, yang berkedudukan di **Jl. Tanjung Tururuka No.48 Kel. Tatura Prov. Sulawesi Tengah**, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar **No. 07** tanggal **05 November 2008**, selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

MENINGAT BAHWA:

1. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka Kota Banjarbaru Nomor 510/001/Kontrak/PPK/Disdag/2017 tanggal 13 November 2017 ;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 510/001/SPMK/PPK/Disdag/2017 tanggal 13 November 2017 ;
3. Surat Penyerah Lapangan (SPL) Nomor 510/001/SPL/PPK/Disdag/2017 tanggal 13 November 2017 ;

Maka oleh karena itu, PPK dan PENYEDIA dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk mengadakan Perubahan atas Surat Perjanjian Nomor 510/001/Add-Kontrak/PPK/Disdag/2017 tanggal 13 November 2017 tanggal 13 November 2017 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal-pasal yang termuat dalam Surat Perjanjian sepanjang tidak dirubah dinyatakan tetap berlaku
2. Pasal-pasal yang termuat dalam Surat Perjanjian (Syarat-Syarat Khusus Kontrak) yang dirubah, ditambah, dihapus dan dikurangi ataupun disempurnakan dinyatakan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Addendum ini

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

SEMULA

- O. Pembayaran Uang Muka** Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (**YA/TIDAK**).
Uang muka diberikan **sebesar 20% (Dua Puluh per seratus)** dari Nilai Kontrak

DIRUBAH

- O. Pembayaran Uang Muka** Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (**YA/TIDAK**).

Dengan demikian, PPK dan PENYEDIA telah bersepakat untuk menandatangani Addendum Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru



RACHMAT HIDAYAT, SH
NIP. 19700702 200701 1 019

Untuk dan atas nama
PT. Bina Karsyam

PENYEDIA



SYAM S. ABDUL MUIS
Direktur Utama



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERDAGANGAN

Jl. Panglima Batur Nomor.08 Telp/Fax. (0511) 4772206 Banjarbaru

Banjarbaru, 17 November 2017

Nomor : 510/KPA-01/Disdag/2017
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Persetujuan Addendum

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Kegiatan Pengembangan
Sarana Distribusi
Perdagangan dan Kapasitas
Logistik Perdagangan
di-

Banjarbaru

Menindaklanjuti Nota Dalam PPK Nomor 004/PPK/2017 tanggal 16 November 2017 perihal Permohonan Addendum Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka Kota Banjarbaru Nomor 510/001/Kontrak/PPK/ Disdag/2017 tanggal 13 November 2017, setelah meneliti isi Surat Perjanjian, KPA setuju untuk PPK dan Kontraktor Pelaksana melakukan addendum terhadap isi Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf O tersebut.

Demikian disampaikan untuk bahan selanjutnya.

Kuasa Pengguna Anggaran


Drs. MUHAMMAD FAUZIE

Pembina Tingkat I
NIP. 19600106 199103 1 004



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERDAGANGAN

Jl. Panglima Batur Nomor.08 Telp/Fax. (0511) 4772206 Banjarbaru

NOTA DALAM

Kepada Yth : Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Dinas
Perdagangan Kota Banjarbaru

Dari : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengembangan Sarana
Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan

Nomor : 004/PPK/2017

Tanggal : 16 Nopember 2017

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Addendum Surat Perjanjian untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Galuh
Cempaka Kota Banjarbaru Nomor 510/001/Kontrak/PPK/
Disdag/2017 tanggal 13 November 2017.

Dari hasil koordinasi dengan Kepala KPPN Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 tentang uang muka 20%, Kepala KPPN Banjarmasin menyarankan agar menghilangkan uang muka, mengingat waktu pelaksanaan hanya 40 hari kalender, untuk itu PPK dan Kontraktor Pelaksana akan melakukan addendum terhadap SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) huruf O. Pembayaran Uang Muka, Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka Kota Banjarbaru Nomor 510/001/Kontrak/PPK/Disdag/2017 tanggal 13 November 2017.

Demikian disampaikan, mohon persetujuan dan untuk menjadi bahan selanjutnya.

Pejabat Pembuat Komitmen

RACHMAT HIDAYAT, SH
NIP. 19700702 200701 1 019

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PERDAGANGAN

Jl. Panglima Batur Nomor.08 Telp/Fax. (0511) 4772206 Banjarbaru



ADDENDUM 02

NOMOR : 510/002/Add-Kontrak/PPK/DISDAG/2017,
TANGGAL 4 Desember 2017

ATAS

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN
NOMOR : 510/001/Kontrak/PPK/DISDAG/2017
TANGGAL : 13 Nopember 2017

PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT GALUH CEMPAKA
KOTA BANJARBARU

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

DENGAN

PT. BINA KARSYAM



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERDAGANGAN

Jl. Panglima Batur Nomor.08 Telp/Fax. (0511) 4772206 Banjarbaru

Nomor : 510/KPA-02/Disdag/2017
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Persetujuan Addendum Kedua

Banjarbaru, 4 Desember 2017

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Kegiatan Pengembangan
Sarana Distribusi
Perdagangan dan Kapasitas
Logistik Perdagangan
di-
Banjarbaru

Menindaklanjuti Nota Dalam PPK Nomor 005/PPK/2017 tanggal 2 Desember 2017 perihal Permohonan Addendum Ke-2 Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka Kota Banjarbaru Nomor 510/001/Kontrak/PPK/ Disdag/2017 tanggal 13 November 2017, setelah meneliti isi Surat Perjanjian, KPA setuju untuk PPK melakukan addendum ke-2 terhadap isi dari pasal-pasal seperti yang disebutkan di dalam Nota Dalam PPK tersebut.

Demikian disampaikan untuk bahan selanjutnya.

Kuasa Pengguna Anggaran


Drs. MUHAMMAD FAUZIE

Pembina Tingkat I
NIP. 19600106 199103 1 004



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERDAGANGAN

Jl. Panglima Batur Nomor.08 Telp/Fax. (0511) 4772206 Banjarbaru

NOTA DALAM

Kepada Yth : Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Dinas
Perdagangan Kota Banjarbaru

Dari : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengembangan Sarana
Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan

Nomor : 005/PPK/2017

Tanggal : 2 Desember 2017

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Addendum Ke-2 Surat Perjanjian untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Galuh
Cempaka Kota Banjarbaru Nomor 510/001/Kontrak/PPK/
Disdag/2017 tanggal 13 November 2017.

Berdasarkan yang tersebut di bawah ini :

1. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
3. CCO.01 dan CCO.02;
4. Laporan harian Kontraktor Pelaksana, Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pekerjaan Konsultan Pengawas dan dari hasil data curah hujan Layanan Informasi Meteorologi www.ogimet.com, curah hujan cukup tinggi;

maka PPK dan Kontraktor Pelaksana akan melakukan addendum ke-2 Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka Kota Banjarbaru Nomor 510/001/Kontrak/PPK/ Disdag/2017 tanggal 13 November 2017 terhadap pasal-pasal sebagai berikut :

- a. Nilai Kontrak semula termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 5.680.000.000,00 (Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dirubah menjadi sebesar Rp. 4.770.301.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);

- b. Tanggal Berlaku Kontrak semula berlaku sejak: 13 November 2017 s.d. 22 Desember 2017 dirubah menjadi 13 November 2017 s.d. 31 Desember 2017.
- c. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 40 (Empat Puluh) hari kalender dirubah menjadi Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 49 (Empat Puluh Sembilan) hari kalender.

Demikian disampaikan, mohon persetujuan dan untuk menjadi bahan selanjutnya.

Pejabat Pembuat Komitmen



RACHMAT HIDAYAT, SH
NIP. 19700702 200701 1 019



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERDAGANGAN

Jl. Panglima Batur Nomor.08 Telp/Fax. (0511) 4772206 Banjarbaru

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:
Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka Kota Banjarbaru
Nomor :
510/002/Add-Kontrak/PPK/Disdag/2017

“ADDENDUM SURAT PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani di **Banjarbaru** pada hari **Senin** tanggal **Empat** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** antara **RACHMAT HIDAYAT, SH**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama **Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru**, yang berkedudukan di **Jl. Panglima Batur Nomor.08 Telp/Fax. (0511) 4772206 Banjarbaru**, berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR 1070/M-DAG/KEP/9/2017** tanggal **5 September 2017** selanjutnya disebut “**PPK**” dan **SYAM S. ABDUL MUIS, Direktur Utama**, yang bertindak untuk dan atas nama **PT Bina Karsyam**, yang berkedudukan di **Jl. Tanjung Tururuka No.48 Kel. Tatura Prov. Sulawesi Tengah**, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar **No. 07** tanggal **05 November 2008**, selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

MENINGAT BAHWA:

1. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka Kota Banjarbaru Nomor 510/001/Kontrak/PPK/Disdag/2017 tanggal 13 November 2017 ;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 510/001/SPMK/PPK/Disdag/2017 tanggal 13 November 2017 ;
3. Surat Penyerah Lapangan (SPL) Nomor 510/001/SPL/PPK/Disdag/2017 tanggal 13 November 2017 ;
4. Addendum Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka Kota Banjarbaru Nomor 510/001/Add-Kontrak/PPK/Disdag/2017 tanggal 20 November 2017

Maka oleh karena itu, PPK dan PENYEDIA dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk mengadakan Perubahan atas Surat Perjanjian Nomor 510/001/Add-Kontrak/PPK/Disdag/2017 tanggal 13 November 2017 tanggal 13 November 2017 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal-pasal yang termuat dalam Surat Perjanjian sepanjang tidak dirubah dinyatakan tetap berlaku
2. Pasal-pasal yang termuat dalam Surat Perjanjian (Syarat-Syarat Khusus Kontrak) yang dirubah, ditambah, dihapus dan dikurangi ataupun disempurnakan dinyatakan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Addendum ini

SEMULA

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan PENYEDIA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 5.680.000.000,00 (Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);**

DIRUBAH

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan PENYEDIA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 4.770.301.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);**

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

SEMULA

D. Tanggal Berlaku Kontrak Kontrak mulai berlaku sejak: **13 November 2017 s.d. 22 Desember 2017.**

DIRUBAH

D. Tanggal Berlaku Kontrak Kontrak mulai berlaku sejak: **13 November 2017 s.d. 31 Desember 2017.**

SEMULA

E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : **40 (Empat Puluh) hari kalender.**

DIRUBAH

E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : **49 (Empat Puluh Sembilan) hari kalender.**

Dengan demikian, PPK dan PENYEDIA telah bersepakat untuk menandatangani Addendum Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru



RACHMAT HIDAYAT, SH
NIP. 19700702 200701 1 019

Untuk dan atas nama
PT. Bina Karsyam

PENYEDIA



SYAM S. ABDUL MUIS
Direktur Utama

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PERDAGANGAN

Jl. Panglima Batur Nomor.08 Telp/Fax. (0511) 4772206 Banjarbaru



ADDENDUM 03

NOMOR : 510/003/Add-Kontrak/PPK/DISDAG/2018,
TANGGAL 1 Januari 2018

ATAS

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN
NOMOR : 510/001/Kontrak/PPK/DISDAG/2017
TANGGAL : 13 Nopember 2017

PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT GALUH CEMPAKA
KOTA BANJARBARU

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

DENGAN

PT. BINA KARSYAM

Jl. Tanjung T. No. 48 Kel. Tatura Prov. Sulawesi Tengah



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERDAGANGAN

Jl. Panglima Batur Nomor.08 Telp/Fax. (0511) 4772206 Banjarbaru

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:
Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka Kota Banjarbaru
Nomor :
510/003/Add-Kontrak/PPK/Disdag/2018

"ADDENDUM SURAT PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani di Banjarbaru pada hari **Senin** tanggal **Satu** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** antara **RACHMAT HIDAYAT, SH**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama **Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru**, yang berkedudukan di **Jl. Panglima Batur Nomor.08 Telp/Fax. (0511) 4772206 Banjarbaru**, berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR 1070/M-DAG/KEP/9/2017** tanggal **5 September 2017** selanjutnya disebut "**PPK**" dan **SYAM S. ABDUL MUIS, Direktur Utama**, yang bertindak untuk dan atas nama **PT Bina Karsyam**, yang berkedudukan di **Jl. Tanjung Tururuka No.48 Kel. Tatura Prov. Sulawesi Tengah**, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 07 tanggal **05 November 2008**, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA:

1. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka Kota Banjarbaru Nomor 510/001/Kontrak/PPK/Disdag/2017 tanggal 13 November 2017;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 510/001/SPMK/PPK/Disdag/2017 tanggal 13 November 2017;
3. Surat Penyerah Lapangan (SPL) Nomor 510/001/SPL/PPK/Disdag/2017 tanggal 13 November 2017;
4. Addendum Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka Kota Banjarbaru Nomor 510/001/Add-Kontrak/PPK/Disdag/2017 tanggal 20 November 2017;
5. Addendum Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Galuh Cempaka Kota Banjarbaru Nomor 510/002/Add-Kontrak/PPK/Disdag/2017 tanggal 4 Desember 2017;

Waka oleh karena itu, PPK dan PENYEDIA dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk mengadakan Perubahan atas Surat Perjanjian Nomor 510/001/Add-Kontrak/PPK/Disdag/2017 tanggal 13 November 2017 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal-pasal yang termuat dalam Surat Perjanjian sepanjang tidak dirubah dinyatakan tetap berlaku;

2. Pasal-pasal yang termuat dalam Surat Perjanjian (Syarat-Syarat Khusus Kontrak) yang dirubah, ditambah, dihapus dan dikurangi ataupun disempurnakan dinyatakan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Addendum ini;

SEMULA

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan PENYEDIA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 4.770.301.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);**

DIRUBAH

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan PENYEDIA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 3.243.804.680,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah)** didanai dengan Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dan;

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 1.526.496.320,00 (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)** didanai dengan APBDP/ABT Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru yang akan dibayar setelah anggaran disahkan;

Dengan demikian, PPK dan PENYEDIA telah bersepakat untuk menandatangani Addendum Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru



RACHMAT HIDAYAT, SH
NIP. 19700702 200701 1 019

Untuk dan atas nama
PT. Bina Karsyam

PENYEDIA



SYAM S. ABDUL MUIS
Direktur Utama